

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

(2)

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2005

2005, Kemiskinan Makin Mengancam

Subsidi Harus Tepat Sasaran

Berat dan sulit. Itulah gambaran hidup bakal dijalani banyak orang tahun 2005 ini, terutama mereka yang sebelumnya hidup di bawah garis kemakmuran. Bagaimana tidak, pemerintah lewat kebijakannya telah menyatakan niatnya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mungkin, bisa sampai 40 persen di tahun ini. Meski memang belum dilakukan di awal tahun, namun kebijakan itu tampaknya sudah pasti akan terjadi. Alasannya, pemerintah sudah tak kuat lagi menanggung beban pembayaran subsidi BBM yang nilainya terus meroket sampai puluhan triliun.

Dan apakah artinya dana kompensasi, jika di sisi lainya kebutuhan hidup mereka tak tertanggulangi. Itu, belum lagi ditambah persoalan tidak efisiennya penyaluran dana kompensasi. Perlu digarisbawahi, sampai saat ini masih banyak keluhan akan ketidakefektifan dana pengalihan subsidi ini.

"Saya khawatir sekali harga akan naik lagi. Padahal penghasilan kami tidak seberapa," ujar seorang ibu rumah tangga yang mengaku bernama Warti, yang tinggal di kawasan Bogor saat ditanya soal kemungkinan naiknya harga BBM tahun ini.

Warti mengakui, dirinya bukanlah penikmat BBM seperti premium, solar, apalagi petramax. Itu mungkin hanya angan-angan saja untuk dia. Jangankan mobil mewah, motorpun ia tak mampu membelinya. Ia harus bisa menutupi kebutuhan keluarganya hanya dari penghasilan suaminya yang bekerja sebagai buruh lepas sebesar Rp 7.500 per hari. "Itu juga masih gak tentu," keluhnya.

Diakuinya, soal makan, Warti merasa sedikit tertolong dengan pembagian beras untuk orang miskin (raskin) yang selama dua tahun terakhir ini diterimanya. "Saya sih merasa agak terbantu juga dengan adanya raskin. Saya dapatkan 5 kilogram setiap minggunya, meski kadang agak sulit juga," katanya. Namun, untuk jaminan lainnya, seperti yang pernah dinantikan pemerintah, seperti kartu sehat atau beasiswa sekolah untuk anaknya, Warti mengaku belum pernah menerima. Dia bahkan mengaku tak pernah dengar. "Memangnya ada ya yang seperti itu," tanyanya.

Nasib Warti dan keluarganya juga dialami oleh puluhan juta orang lainnya di tanah air. Mereka yang hidup miskin, tak punya harapan, dan hanya cukup senang dengan pembagian beras raskin hasil pengalihan subsidi BBM itu. Jika penghapusan subsidi hanya bisa menanggung makan mereka dan tidak meningkatkan derajat mereka, mengangkat mereka dari jurang kemiskinan, rasanya terlalu mahal biaya yang harus ditanggung seluruh masyarakat Indonesia, yang lagi-lagi harus mengetatkan ikat pinggang karena naiknya BBM dan efek bola saljunya yang sudah pasti kian membesar.

Ekonom yang sangat *concern* dengan masyarakat bawah, yakni Bustanul Arifin, mengaku sangat pesimis dengan nasib orang miskin di tahun 2005 ini. Bustanul dalam percakapannya dengan *Suara Karya* menyatakan bahwa kemiskinan tahun 2005 ini akan makin mencancam. Bukan tidak mungkin orang yang miskin akan semakin bertambah jumlah dan tingkat kemiskinannya.

Khusus soal kompensasi BBM, seperti pembagi Raskin misalnya, dia mengungkapkan kenyataan yang tidak segampang digambarkan pemerintah dalam setiap iklannya. Bustanul, yang mengaku pernah melakukan riset mengenai Raskin menyebut dana kompensasi BBM

bahkan tidak bisa dikatakan sebagai hiburan untuk orang miskin. Kenyataan menunjukkan pemerintah sama sekali belum siap secara administrasi untuk menempuh kebijakan pengalihan subsidi ini.

"Ini sangat sulit, kompensasi BBM seringkali tidak tepat sasaran. Banyak hal yang tidak disangka oleh pemerintah, yang sebenarnya memang terjadi di tingkat bawah," ujar dia. Dimana, birokrasi di tingkat lokal tidak akan terbayangkan oleh pemerintah pusat. "Ada yang namanya politik lokal, tekan menekan, jadi masih banyak masalah," kata Bustanul, ekonom yang tergabung di Indef ini.

Dia menggambarkan bagaimana seorang lurah yang bertugas membagikan beras raskin 20 kilogram per bulan untuk tiap keluarga, harus melakukan pembagian itu sendiri karena masyarakat lain yang tidak dikategorikan miskin dan tak mendapat jatah raskin berharga 1000 per kilogram itu, tidak mau membantunya. "Mereka (masyarakat yang tak bisa menerima raskin itu) mengatakan 'suruh saja orang miskin itu yang melakukannya karena mereka yang mendapatkan jatah,'" cerita Bustanul.

Pada akhirnya, lurah itu membuat maneuver sendiri dengan membagikan secara merata beras masing-masing 10 kilogram per bulan baik untuk yang miskin ataupun yang tidak. Bustanul juga menyebutkan, ada hal yang tak terpikirkan oleh pemerintah, bahwa uang Rp 20 ribu untuk 20 kilogram beras itu terkadang sangat sulit bagi orang miskin.

"Untuk orang miskin menebus dengan 20 ribu puntuk semua adalah hal yang sulit, jadi sama saja, sementara jika pemerintah menaikkan harga BBM sudah pasti harga naik dan daya beli masyarakatpun pastinya akan menurun," katanya.

7

Sebenarnya, kata dia, ada pemecahan bagi pemerintah agar subsidi bisa lebih tepat sasaran. Dia mengaku pernah mengusulkan agar ada distribusi kupon di tempat tertentu sehingga orang miskin tak harus melalui jalur pemerintahan lokal untuk menebus jatahnya. Tetapi kelihatannya pemerintah tidak percaya diri untuk melakukan hal yang sifatnya spekulasi ini. "Entrepermeship dan sosialisasi kompensasi BBM sama sekali tak pernah di bahas oleh pemerintah. Harusnya kan seperti orang naik kelas, sesudah ini apa dan apa, ini tidak ada sama sekali," katanya.

Hal senada dikemukakan oleh pengamat ekonomi lainnya, Aviliani. Menurutnya, prospek orang miskin tahun 2005 memang masih buram. Sangat kecil kemungkinan pemerintah bisa mengurangi jumlahnya. Orang miskin tidak mustahil akan bertambah banyak jika pemerintah tidak bisa menjaga kestabilan harga pada tahun 2005, yang miskin dipastikan akan bertambah miskin, karena daya beli masyarakat akan hancur, anjlok.

Avi sendiri berpendapat, Bulog harusnya berperan lebih maksimal dalam menjaga keseimbangan harga. Karena di matanya, orang miskin sangat sensitif dengan masalah sembilan bahan pokok. "Sebenarnya kalau produsen sendiri kan dengan adanya kenaikan harga BBM pasti melakukan berbagai efisiensi agar produknya harga tidak mahal, karena kalau mahal pun pasti tidak akan bisa bersaing. Kalau Bulog tidak mampu maka akan menghancurkan daya beli masyarakat," katanya.

(Nunun Nurbaiti)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

Pembagian Minyak Tanah Gratis Kisruh

BANDA ACEH.— Kegiatan pembagian minyak tanah gratis yang digelar pemerintah di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, berlangsung kisruh. Ratusan warga yang antri dalam kegiatan operasi pasar itu melakukan protes dan mengeluhkan cara pembagian.

Sejak pukul 10.00 WIB kemarin, antrian warga yang ingin mendapatkan minyak tanah gratis sudah membentuk kurva tak beraturan dari Jalan Soekarno-Hatta hingga masuk gang-gang di sepanjang jalan itu. Penduduk yang berasal dari segala usia itu datang dengan ember, botol, dan jeriken berbagai ukuran. Mudasin, 27 tahun, yang datang sekitar pukul 11.00 mengatakan, dia sudah antri sejak satu jam yang lalu dan belum mendapatkan apa-apa.

Semula, dalam kebijakannya, pemerintah akan membagikan minyak tanah secara gratis sebanyak lima liter

per orang dan diprioritaskan bagi pengungsi. Namun, dalam prakteknya, *Tempo* sempat memergoki seseorang membawa satu jeriken penuh minyak tanah ukuran 20 liter.

Pembagian minyak tanah juga dilakukan tidak menggunakan alat ukur yang baku. Setiap warga yang datang diberi minyak tanah sesuai dengan tempat yang mereka bawa. Jika membawa botol minuman plastik, botol akan diisi penuh. Ada pula jeriken ukuran 20 liter yang hanya diisi seperempat bagian dan ada juga yang penuh. Begitu pula membawa ember. "Kalau temannya diisi penuh, sedangkan yang lain tidak," ujar Ibrahim, 55 tahun, warga Keutapang, kepada *Tempo*.

Ketidakadilan membuat Ibrahim melakukan protes terhadap petugas yang membagikan minyak tanah tersebut. Pria ini meminta petugas untuk tidak pilih-pilih kasih soal pembagian.

Ia juga mengatakan, sebagian warga yang datang juga bukan berasal dari Keutapang.

Sementara itu, sebagian orang yang ingin menyela antrian disambut dengan teriakan-teriakan. Petugas juga kerepotan mengatur ratusan warga yang terus berdatangan itu. Salah satu petugas yang ditemui di lapangan menolak berkomentar saat ditanyai soal kisruh itu.

General Manager Pertamina UPMS I Medan Khoirul Fuadi saat dimintai konfirmasi mengaku tidak tahu-menahu soal kekisruhan dalam pembagian minyak tanah gratis itu. Menurut dia, Pertamina tidak ikut terlibat dalam proses distribusi kepada masyarakat Aceh. "Proses pembagian itu telah kami serahkan sepenuhnya kepada posko pemerintah di masing-masing wilayah Aceh," ujarnya kepada *Tempo* kemarin. ● edy can/setri yasa

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- ()

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2005

Pasokan BBM ke Banda Aceh Lancar

MEDAN (Media): Suplai bahan bakar minyak (BBM) ke Banda Aceh dilaporkan sudah berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kendaraan-kendaraan yang dipergunakan untuk mengevakuasi korban.

PT Pertamina (Persero) telah mengirimkan BBM ke Banda Aceh dengan mobil tangki jalan darat, masing-masing dari Depot Lhok Seumawe, Sei Siak, Instalasi Labuhan Deli Medan, Depot Dumai sejak 27 Desember 2004 lalu hingga 1 Januari 2005. BBM yang telah tersalurkan adalah jenis premium sebanyak 1.185 kiloliter (kl), solar 720 kl, minyak tanah 159 kl, dan avtur untuk pesawat 79 kl.

Juru bicara Posko Bencana Gempa dan Badai Tsunami di NAD dan Sumut Eddy Syofian di Medan, kemarin petang, mengatakan kebutuhan BBM untuk masyarakat di Kota Banda Aceh juga terus ditambah. Iring-iringan mobil tangki untuk menambah pasokan saat ini sedang dalam perjalanan dan mendekati Banda Aceh dengan mengangkut premium 162 kl, minyak solar 192 kl, minyak tanah 54 kl, dan avtur 73 kl.

Pengiriman BBM menggunakan mobil tangki dari instalasi Labuhan Deli Medan juga dibe-rangkatkan kemarin. Yakni, premium sebanyak 66 kl (4 mobil tangki), minyak solar 64 kl (4 mobil tangki), dan avtur 36 kl (2 mo-

bil tangki). Kemudian stok BBM dalam drum di Instalasi Labuhan Deli yang siap kirim; premium 180 drum, minyak solar 15 drum, minyak tanah 25 drum.

Pengiriman BBM ke Banda Aceh bisa ditingkatkan bila ada mobil tangki yang tidak beroperasi atau yang kembali dari Banda Aceh, sementara stok avtur di Depot Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada 1 Januari 2005 masih tersimpan 160 kl.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nanggroe Aceh Darussalam Aminullah Usman menyatakan, BPD di Kota Banda Aceh siap beroperasi kembali mulai hari ini dan siap melayani nasabah, termasuk pembayaran gaji

pegawai negeri.

"Kami juga siap membayar gaji PNS dan berbagai instansi terkait untuk bulan Januari. Semua transaksi keuangan bisa dilayani," katanya, kemarin.

Ia mengatakan, sebanyak 300 ribu nasabah tabungan dan 49 ribu nasabah kredit tidak perlu khawatir karena datanya masih tersimpan dengan baik. "Data yang ada pada kami tersimpan dengan baik di bank data kami dengan *back up* pada BPD Sumut yang dibantu dengan sistem terintegrasi dari Jakarta."

Menurut dia, dari 12 cabang utama dan 22 kantor kas di NAD, sekarang ini hanya kantor cabang Meulaboh yang akan dialihkan ke Jeulam. (Ant/X-7)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2005

**ANTRE
MINYAK TANAH**

RATUSAN warga Aceh antre minyak tanah bantuan pemerintah untuk para korban gempa bumi dan badai tsunami di Kota Banda Aceh, Sabtu (1/1). Bantuan sudah mulai dapat terdistribusikan untuk korban gempa dan tsunami di Aceh.



REUTERS

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2004

'Avtur sulit didapat di Medan dan Aceh'

JAKARTA (Bisnis): Pemerintah didesak segera mengawasi penyaluran avtur terkait adanya informasi kelangkaan bahan bakar pesawat itu di Bandara Polonia Medan dan Blang Bintang Banda Aceh yang menyebabkan distribusi bantuan terhambat.

Kordinator Komisi Darurat Kemanusiaan Faisal Basri menegaskan pemerintah harus lebih serius menyalurkan

avtur dan melakukan pengawasan di lapangan.

"Saat ini yang menjadi andalan distribusi bantuan ke lokasi bencana yang sulit dijangkau seperti Meulaboh hanya pesawat udara. Karena itu, avtur menjadi sangat penting," ujarnya pekan lalu.

Komisi Darurat Kemanusiaan yang terdiri dari koalisi kelompok masyarakat sipil terdiri dari perorangan dan

LSM mengkhawatirkan terjadinya penyelewengan penyaluran avtur.

Sesuai dengan janji Pertamina, ujar Faisal, avtur untuk distribusi bantuan digratiskan, namun di lapangan kenyataannya sangat langka ditemui.

Kekhawatiran adanya penyelewengan terkait langkanya avtur juga diungkapkan Hanung dari Transparency

International Indonesia.

"Saya sudah bertemu dengan pihak Pertamina, Kamis pekan lalu, mereka mengaku sudah mengirim 2.000 drum avtur dari Jakarta, namun di lapangan sulit sekali mendapatkannya," ungkapnya.

Satu helikopter milik Transparency International Indonesia untuk distribusi bantuan akhirnya tidak dapat digunakan karena tidak ada bahan bakar.

Hanung mengatakan telah berusaha mencari avtur komersial di Bandara Polonia Medan, namun tidak juga bisa didapatkan.

Sementara Kadispen TNI AU Marsma Sagom Tamboen menyatakan belum mengetahui adanya kelangkaan avtur di Medan, namun kelangkaan avtur terjadi di Banda Aceh. (10)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /3

TAHUN 2004

ExxonMobil signs Aceh gas deal

Zakki P. Hakim
The Jakarta Post/Jakarta

ExxonMobil signed on Friday an agreement that would secure the year's natural gas supply for fertilizer firms PT Pupuk Iskandar Muda I and II (PIM-1, PIM-2) in Aceh as the country enters planting season.

The agreement, signed at the office of the Oil and Gas Implementing Body (BP Migas), allows oil and gas giant ExxonMobil Oil Indonesia to supply 57 million standard cubic feet per day (mmscfd) of natural gas to PIM-1 starting this week.

ExxonMobil is currently the sole natural gas producer in Aceh, and its output is largely converted into liquefied natural gas for the Arun LNG plant, which is then exported.

Another deal is expected to

be signed in February or March to secure about 60 mmscfd of natural gas for PIM-2, BP Migas head Rachmat Sudibyo said.

The two deals should cover almost all of the firms' operational need of 120 mmscfd of natural gas.

"The contract is a result of the government's effort to meet the gas demand in Aceh, as well as to help recover the economy devastated by the recent tragedy," said Rachmat, referring to the massive quake and tsunamis that hit Aceh and North Sumatra last weekend, which has killed more than 100,000 people.

Lili Djadjuli, PIM technical and development director, said the company expected to start receiving the supply on Tuesday.

The two firms have a combined annual production volume of about 600,000 tons of

fertilizer, making them the largest suppliers for Aceh and North Sumatra.

Fertilizer firms in Aceh have been struggling to survive because of a gas shortage from depleted reserves.

PIM-1 has been operating at below 80 percent production capacity, while PIM-2 did not produce fertilizer in 2004.

PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), another fertilizer firm, was closed down by the government last October because of the shortage.

The closure of AAF gave rise to fears that the other two fertilizer producers would follow suit and disrupt the national fertilizer supply.

Earlier this year, South Sumatra-based fertilizer maker PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) was forced to provide about 21,000 tons of fertilizer to meet demand in the two provinces.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2005

Pemerintah Tetap Menaikkan Harga BBM pada Awal Tahun

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak akan menunda pelaksanaan program kerja yang telah dibuat, termasuk rencana menaikkan harga bahan bakar minyak meskipun ada kasus bencana gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam. Kenaikan harga BBM adalah keputusan yang menurut pemerintah tak bisa dihindari untuk mengalihkan subsidi BBM untuk subsidi kepada orang miskin.

Demikian dikemukakan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada *Kompas* dalam perjalanan dari Banda Aceh ke Jakarta, Jumat (31/12) malam. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menurut Jusuf Kalla, terpaksa dilakukan karena pemerintah tak sanggup menanggung beban subsidi yang pada 2004 mencapai Rp 70 triliun akibat lonjakan harga minyak mentah. Ia tidak mengatakan berapa besar kenaikan harga BBM untuk masing-masing jenis BBM.

Jusuf juga mengatakan, pemerintah telah memulai program sosialisasi kenaikan harga

BBM di media massa. Hal itu untuk memberikan penjelasan bahwa subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh pemilik kendaraan. Karena itu, kenaikan harga BBM justru memberikan peluang lebih besar untuk membantu orang miskin.

Informasi yang diperoleh *Kompas*, pemerintah hampir pasti akan menaikkan harga BBM pada Februari 2005. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan formulasi besarnya kenaikan harga dan kompensasi yang akan diberikan untuk mengurangi dampak dari kenaikan tersebut. Sebelumnya Menteri Negara Perencanaan Pemba-

ngunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani mengatakan, subsidi BBM pada APBN 2005 hanya Rp 30 triliun-Rp 35 triliun. Jumlah ini didasarkan pada asumsi harga minyak 30-35 dollar AS per barrel. Jumlah ini sekitar separuh dari subsidi BBM pada APBN 2004 yang Rp 60 triliun-Rp 65 triliun.

Harus siap

Anggota Komisi XI DPR Rama Pratama menegaskan, pemerintah harus membuat persiapan menyeluruh dalam program kompensasi sebelum menaikkan harga BBM. Tanpa persiapan itu, kenaikan harga BBM akan menimbulkan masalah. Rama mengatakan, penyumbang defisit dalam APBN sebenarnya karena utang tidak dikelola dengan benar. Selain itu, tak ada gunanya jika subsidi BBM dihapus, sementara korupsi, kolusi dan nepotisme di Pertamina tak dibereskan.

Menurut Rama, yang perlu dilakukan untuk mengurangi defisit adalah membereskan

korupsi, memperbaiki manajemen utang, dan audit Pertamina. Setelah itu, menyusun program kompensasi untuk menghindari dampak kenaikan harga BBM. Ditegaskan, sebelum menetapkan kenaikan harga BBM, pemerintah wajib bertemu DPR. Hal itu bukan karena DPR tak setuju, tapi untuk melihat persiapan pemerintah.

Sementara itu, meskipun pasokan gas dari lapangan gas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mulai berkurang, pemerintah tetap mengalokasikan gas untuk pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Lhok Seumawe. Total gas yang dialokasikan untuk PIM I dan PIM II mencapai 120 juta kaki per hari (MMCFD).

Kontrak jual beli gas antara ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) dan PT PIM ditandatangani Jumat lalu. Tahap pertama, pasokan akan dimulai Januari 2005 dengan volume 60 MMCFD dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan PIM II, Februari atau Maret 2005. (BOY)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2005

F-KB Tolak Elpiji Naik

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat (F-KB DPR) menyatakan menolak keras kenaikan harga elpiji dan juga rencana kenaikan harga bahan bakar minyak menirnbang beban berat yang ditanggung masyarakat saat ini. Pemerintah diharapkan melakukan pembicaraan ulang dengan DPR.

"Meski juga berkeberatan, F-KB menyatakan dapat memahami kenaikan pertamax dan pertamax plus," demikian rekomendasi dalam catatan akhir tahun F-KB DPR yang disampaikan, Kamis (30/12).

Menurut Ketua F-KB Ali Masykur Musa, kenaikan harga elpiji sangat berpengaruh karena data Badan Pusat Statistik menunjukkan pengguna elpiji mencapai 16 persen. Karena itu, pemerintah tidak semestinya mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga elpiji setiap tahun sekadar untuk mengejar atau mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mestinya pemerintah mengambil upaya lain untuk melakukan efisiensi dan pemberantasan korupsi di Pertamina, menghapus atau mengurangi subsidi pemilik perbankan, ataupun melakukan audit operasional dan finansial mengenai bahan bakar minyak. (DIK)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2005

Ambon — Akibat perayaan dan masa liburan tahun baru, pasokan bensin ke Kota Ambon sempat terhambat. Terbatasnya keberadaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Ambon yang hanya berjumlah dua buah semakin menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak. Sampai Minggu (2/1) petang, sejumlah warga masih mengeluhkan sulitnya mencari bensin untuk kendaraan mereka. Di beberapa pedagang pengecer, seperti di daerah Air Salobar, warga masih antre untuk mendapatkan bensin. Akibat kelangkaan tersebut, harga bensin di beberapa pengecer naik dari harga normal Rp 2.000 per liter menjadi Rp 2.500 per liter. Kepala PT Pertamina (Persero) Cabang Ambon Sidhi Widyawan mengatakan, kelangkaan bensin di sejumlah pengecer dan satu-satunya SPBU di dalam kota disebabkan persediaan yang ada pada mereka habis terjual saat pesta pergantian malam tahun baru lalu. (MZW)

15

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004

Kebijakan Energi Menuju Liberalisasi BBM

Ke depan, tampaknya Pemerintah sudah memasang ancang-ancang untuk menerapkan kebijakan energinya, terutama bahan bakar minyak (BBM) yang tidak lagi disubsidi, tapi kian mengarah menuju liberalisasi mengikuti perkembangan pasar.

Upaya-upaya ke arah itu telah beberapa kali didevulkan oleh pejabat tinggi negara mulai dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie, Menkominfo, Sofyan Djalil, bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Pemerintah akan menaikkan harga BBM sekitar 10 sampai 40 persen.

Purnomo Yusgiantoro dalam paparan blue print kebijakan energi 2005 menerangkan bahwa Pemerintah kini tengah menyiapkan liberalisasi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap yang dimulai dengan tahapan transisi mulai 2005 sebagai masa semi-liberalisasi dan menuju tahapan pemantapan di tahun 2010 sebagai masa liberalisasi secara menyeluruh.

Pada tahapan masa semi liberalisasi bisa saja per produk BBM, namun bisa juga per lintas sektoral (cross section). Untuk semi-liberalisasi mungkin dilakukan pada minyak bakar, diesel, dan premium. Tapi terhadap minyak tanah dan solar karena harga subsidi cukup besar maka dilakukan bertahap.

Bahkan Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie menyatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005 semakin cepat dilakukan akan semakin baik dan

bila itu dilakukan sebaiknya pada masa panen sehingga tidak membuat gejolak inflasi.

Berbagai alasan pula disampaikan oleh pemerintah bahwa subsidi BBM tersebut disamping memberatkan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) akibat harga minyak mentah di pasar internasional terus meningkat hingga di atas 40 dolar AS per barel, juga bisa menjadi kurang baik dalam kehidupan masyarakat di negeri ini. Dengan adanya subsidi BBM, maka akan tercipta disparitas harga sehingga mendorong terjadinya praktek pengoplosan dan penyeludupan.

Bahkan dalam pengamatan Pemerintah, bahwa keberadaan subsidi BBM yang telah mencapai Rp72 triliun itu juga menimbulkan ketidakadilan

karena kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi lebih menikmati subsidi tersebut ketimbang yang dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam paparan data dan fakta berkaitan dengan reformasi harga BBM, Menteri Komunikasi dan Informasi, Sofyan Djalil berpendapat subsidi BBM yang tidak ber sasaran justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat kaya dibanding masyarakat berpenghasilan rendah.

Kelompok masyarakat berpenghasilan tertinggi rata-rata menikmati subsidi BBM sebesar Rp393.000 per tahun, sedangkan kelompok masyarakat berpenghasilan terendah rata-rata hanya menikmati subsidi Rp72.500 per tahun.

Perhitungan tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan rata-rata konsumsi BBM

per orang per tahun pada masing-masing kelompok berdasarkan data Susenas 2003 dengan selisih antara harga yang berlaku dengan harga berdasarkan harga internasional (minyak tanah Rp3.740, bensin Rp3.425, dan solar Rp3.582 per liter).

Subsidi BBM justru akan lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan yang lebih tinggi karena distribusi konsumsi BBM dan minyak tanah semakin besar untuk kelompok masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi.

Disebutkannya, 60% kelompok penduduk yang terdiri dari kelompok menengah hingga atas mengkonsumsi 84% dari distribusi BBM dan 74% dari jumlah minyak tanah yang didistribusikan.

Tepat guna Di sisi lain, keterbatasan sumber daya energi di Indonesia, terutama minyak yang dalam beberapa tahun terakhir ini semakin berkurang, pengurangan subsidi BBM dimaksudkan agar pemanfaatan sumber minyak di dalam negeri dapat lebih tepat guna.

Cadangan minyak Indonesia semakin berkurang dan apabila tidak ditemukan cadangan terbukti (proven reserve) maka dalam kurun waktu 11 tahun ke depan Indonesia bisa jadi pengimpor seluruh kebutuhan minyak mentah dan BBM. Jadi, hal itulah pula yang membuat pemerintah berusaha mengurangi subsidi.

Direktur Sumber Daya Mineral Bappenas, Bemby Uripito menambahkan bahwa pengurangan subsidi akan mem-

buat pemanfaatan energi lainnya lebih ditingkatkan seperti energi geothermal, batubara, gas, dan lainnya.

Sumber energi bukan hanya minyak bumi, tapi ada batubara, gas alam, panas bumi, dan lainnya. Seandainya BBM dinaikkan, maka energi lainnya bisa mendorong pemanfaatannya.

Briket batubara sejak tahun 1993 sudah dibuat, tapi sampai saat ini kurang bisa dimanfaatkan masyarakat, karena kalah bersaing dengan produk BBM lainnya yang disubsidi pemerintah.

Selain itu, subsidi harga BBM yang menjadikan disparitas harga juga mendorong penyeludupan ke negara lain, yang tentunya akan lebih menguntungkan negara lain itu. Apalagi produk BBM seludupan itu dipergunakan untuk kegiatan produksi, maka dapat mengurangi daya saing produk Indonesia, karena biaya produksinya mempergunakan BBM yang disubsidi.

Di bagian lain, dengan pengurangan subsidi BBM diperkirakan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang jumlahnya cukup besar, karena Pemerintah telah mempersiapkan dana kompensasi yang akan disalurkan kepada sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengadaan beras miskin.

Dana kompensasi seperti yang disebutkan Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie nilainya sekitar Rp10-15 triliun, akan dibagikan ke sejumlah sektor, di antaranya ke sektor infrastruktur yang diperkirakan mencapai Rp3-5 triliun.

Di sektor infrastruktur akan terjadi pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan ataupun lainnya yang membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar.

Begitu pula sektor pendidikan, pembangunan sekolah-sekolah di sejumlah daerah juga akan membutuhkan banyak pekerja, bahkan di sektor kesehatan akan dibangun sejumlah puskesmas, termasuk mendatangkan tenaga medis ataupun bidan yang sekarang ini jumlahnya sangat minim, jauh di bawah kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan pengurangan subsidi tersebut, nantinya juga akan menciptakan lapangan kerja baru di dalam negeri dan juga upaya pemanfaatan energi yang ada bisa tetap guna,

● N. Aulia Badar

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16						17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31					

HALAMAN : 10

TAHUN 2004

■ Gempa dan Tsunami Aceh

BPMIGAS, KKKS, dan Pertamina Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke NAD dan Sumut

Jakarta, NERACA

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BPMIGAS) bersama para Kontraktor Kontrak Kerasama (KKKS) menyalurkan bantuan Rp 5,5 miliar bagi para korban bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumut.

Deputi Umum BPMIGAS, Bangun Usman Harahap, Sabtu (1/1) mengatakan, seluruh dana yang terhimpun melalui BPMIGAS mencapai Rp 5,5 miliar. Namun disamping itu masih ada sumbangan sebesar Rp 12,5 miliar yang berasal dari sumbangan kantor pusat perusahaan-perusahaan migas yang berkedudukan di luar negeri dan bantuan tersebut disalurkan langsung melalui pemerintah atau Palang Merah Indonesia (PMI), katanya.

Pada tahap awal, sebagian dana yang disalurkan melalui BPMIGAS, digunakan untuk membantu penyediaan makanan siap saji, pakaian, selimut dan obat-obatan, yang akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno Hatta, pada Minggu (2/1) dinihari. Dana yang digunakan untuk menyiapkan keperluan itu mencapai Rp 1,7 Miliar. Bantuan selanjutnya akan

disalurkan melalui program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di kawasan gempa tersebut.

Sementara itu, bantuan yang sama hari Minggu (02/01) kemarin disiapkan PT (Persero) Pertamina senilai R. 15 Milliar. Bantuan tersebut belum termasuk bantuan yang berasal dari karyawan Pertamina dan anak perusahaan yang sedang dalam proses pengumpulan bantuan. Keseluruhan bantuan ini akan disatukan dalam program Pertamina Peduli untuk meringankan beban yang menimpa saudara-saudara kita di layah-wilayah yang tertimpa musibah.

Untuk menyalurkan bantuan tersebut, menurut Pjs Kepala Divisi Hupmas Pertamina Dwi Martono, Pertamina Peduli mencarter pesawat udara Fokker-100 Pelita Air Service. Bantuan yang dibawa untuk saat ini dalam bentuk obat-obatan, biskuit, susu cair siap minum, pakaian, perlengkapan wanita, serta tim relawan yang melibatkan Wapadri dan Tim Medis untuk menyeruvei tahapan bantuan berikutnya.

Bantuan lainnya yang merupakan bagian dari komitmen bantuan Rp 15 Milliar ini akan diwujudkan dalam bentuk pemberian makan-

an, minuman, pendirian dapur umum, pembukaan Poliklinik Pertamina Peduli di beberapa kota di NAD, serta untuk rehabilitasi sarana dan prasarana umum. Jajaran Direksi dan segenap pekerja Pertamina juga telah berkomitmen untuk menyisihkan sebagian dari gajinya untuk dipotong dan diberikan kepada para korban di Aceh. Pengiriman bantuan ini juga dilengkapi pula dengan bantuan yang berhasil dikumpulkan di Posko Pertamina Peduli.

Hingga saat ini menurut Dwi Martono, Pertamina kehilangan 25 KK beserta beberapa anggota keluarga yang terkena musibah di Banda Aceh dan terjadi kerusakan yang sangat berat pada kedua Depot Pertamina di Krueng Raya (Banda Aceh) dan Meulaboh. Oleh karena itu pasokan BBM untuk wilayah NAD Aceh dilakukan melalui Depo Lhokseumawe.

Sejak Senin 28 Desember 2004, Pertamina telah mengirimkan BBM dari Lhok Seumawe ke Banda Aceh melalui jalan darat, serta menambah 35 armada tangki dari Medan dan 6 dari Pekanbaru. Hingga saat ini jumlah BBM yang telah dikirimkan ke Banda Aceh sebesar Premium (298 KL), Solar (228 KL) dan Minyak Tanah (40

KL). Khusus untuk Minyak Tanah diberikan secara gratis kepada masyarakat dan untuk Avtur pesawat/heli Tim SAR juga diberikan secara gratis. Untuk PLTD Leung Bata (Banda Aceh), Pertamina telah memasok 160 KL solar dari Medan dan Lhokseumawe.

Untuk mengamankan persediaan BBM di Depot Lhokseumawe yang berfungsi sebagai *home base* penyaluran, Pertamina telah menambah pasokan 1400 KL Premium, 2600 KL Minyak Tanah dan 3600 KL Solar melalui tiga kapal tanker MT Warembungan (mengangkut 1300 KL minyak tanah dan 1200 KL Solar), MT Pancoral (mengangkut 1400 KL Premium dan 1200 KL Solar) serta MT Galuh P (mengangkut 1300 KL minyak tanah dan 1200 KL Solar).

Sebagai langkah lanjutan, Pertamina akan mempersiapkan Terminal Kabung Padang yang akan direncanakan berfungsi sebagai *alternative base terminal* untuk melakukan distribusi secara *Ship to Ship* (STS) ke tongkang atau LCT untuk suplai ke Banda Aceh dan Meulaboh. Sementara menunggu persiapan tersebut, Pertamina tetap akan melakukan optimalisasi distribusi melalui darat dengan mobil tangki. (31)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2004

ExxonMobil-PIM Tandatangani Kontrak Jual Beli Gas

Jakarta, NERACA

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) menyatakan, ExxonMobil Oil Indonesia dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menandatangani kontrak jual beli gas sebesar 120 mmcf/d dan akan dibagi dalam dua tahap.

Kepala Divisi Pemasaran LNG (*liquefied natural gas*) BPMIGAS Joko Harsono menyatakan, penyaluran tahap pertama dimulai Januari 2005 dengan volume 60 mmcf/d yang akan digunakan untuk mengoperasikan PIM I.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan PIM II, BPMIGAS akan menambah volume penjualan gas, mulai Februari atau Maret 2005, sebesar 60 mmcf/d. Dengan mekanisme ini, kebutuhan gas untuk dua pabrik pupuk milik negara di kawasan Aceh itu, bisa dipenuhi, seperti yang direkomendasikan rapat sidang kabinet beberapa waktu lalu. Diharapkan melalui kesepakatan ini, pemulihan ekonomi Aceh yang kini sedang terlenda gempa bumi dan gelombang tsunami, bisa dipercepat, kata Joko Harsono, pekan lalu, di Jakarta.

Untuk memenuhi kebutuhan

gas dalam negeri, pemerintah sedang menyusun skema untuk mengalihkan sebagian komitmen lapangan Arun ke Bontang. Semua pihak, baik BPMIGAS, Pertamina, ExxonMobil Oil dan KIKS lainnya tengah duduk bersama, untuk finalisasi kontrak.

Seperti diketahui, selain pabrik PT PIM, ada satu pabrik pupuk patungan Indonesia dan negara Asean, yakni PT AAF (ASEAN Aceh Fertilizer) yang produksinya terganggu karena ketiadaan suplai gas dari Exxon di Arun. Karena keterbatasan itu pabrik pupuk ini sedang dipertimbangkan untuk ditutup, meski sejumlah pihak menolak rencana itu, seperti mantan Ketua Umum Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudhohusodo.

Menurut Siswono, kalau hanya soal pasokan gas, sebenarnya di Aceh ada sumber gas baru belum tereksplorasi. Itulah yang harusnya jadi perencanaan pemerintah untuk dieksplorasi," katanya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh kalangan kelompok kerja dari produsen pupuk mengenai permasalahan gas bumi diketahui bahwa persoalan yang

melilit PT AAF memang krusial. Kronologi persoalan, menurut tim tersebut, kontrak gas bumi PT AAF berakhir 31 Desember 2002. Akan tetapi, pasokan masih terus dipertahankan hingga 5 Agustus 2003 meski kontrak sudah berakhir. Pada tanggal itu pula suplai gas bumi dihentikan. Namun pada 23 November, saat karyawan bersiap-siap akan Lebaran, ExxonMobil mengalirkan gas bumi.

Pemasokan gas itu tidak berjalan lama karena pada 23 Desember 2003 suplai kembali dihentikan. Gas yang ada di Aceh hanya cukup untuk memenuhi kontrak gas alam cair (LNG). Oleh sebab itu, dalam rapat koordinasi terbatas bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Megawati pada 4 Oktober 2004, Menteri ESDM merekomendasi agar PT AAF ditutup.

Namun, melihat perkembangan hasil rapat, mengutip hasil laporan Tim Pokja Produksi, kabarnya PT AAF masih berusaha untuk dipertahankan dengan cara melakukan *swap gas* dari Arun di NAD ke Bontang. Meskipun kontrak pasokan gas selama 20 tahun sudah berakhir, kondisi pabrik masih sangat bagus. (31)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2005

Batalkan Kenaikan Bahan Bakar Minyak

SAYA mengikuti perkembangan tarik-menarik kenaikan BBM, hingga pernyataan Andi Mallarangeng, juru bicara presiden, ketika di Jayapura tanggal 26 Desember 2004, yang telah dirilis media massa bahwa: "Presiden belum ada keputusan tentang kenaikan harga BBM. Ini semua baru dibicarakan dan dipikirkan secara sangat mendalam." Pernyataan Bung Andi tersebut mengindikasikan, presiden masih memiliki hati nurani dan mencintai mayoritas rakyat, serta cukup bi-

aksana menghadapi kondisi objektif di NKRI ini.

Sementara fakta autentik menunjukkan, setiap hari telah terjadi unjuk rasa (demo) menolak kenaikan harga BBM. Demo yang semakin panas, membakar gambar/poster SBY-JK, karena dipicu oleh kenaikan BBM jenis elpiji dan pertamax.

Oleh karena itu, selaku orang kecil dan warga negara Indonesia yang lemah, saya masih menaruh kepercayaan penuh dan harapan besar bahwa presiden akan sampai kepada satu kepastian sikap yang tepat dan benar, setelah melalui proses pemikiran/kajian mendalam dan tajam, dengan memohon bimbingan petunjuk serta pertolongan dan rida Allah SWT. Sehingga presiden mengambil keputusan yang tegas tanpa ragu-ragu: "membatalkan dan menanggulangi kenaikan harga semua jenis BBM, maupun yang lainnya tanpa kecuali".

Mengenai kesulitan pemerintah menanggulangi biaya rutin dan pembangunan, masih banyak jalan

dan cara yang tidak mengorbankan menyakiti hati mayoritas rakyat/warga negara. Salah satunya adalah bersumber dari para koruptor kelas kakap di atas Rp 100 juta s.d. triliun rupiah. Caranya: 1. Kesadaran dan sportivitas para koruptor yang tobat nasuha mengembalikan uang/aset negara/daerah yang telah dikorupsi itu. 2. Mengambil kembali uang/aset negara/daerah dari para koruptor, melalui proses pengadilan yang berlangsung cepat.

Hasan M, Saudha
Jln. Sadang Luhur V No. 2
RT 03 RW 15
Perumahan Sadang Serang
Bandung

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 ③ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2005

SPSI Tolak Kenaikan BBM

BANDUNG - KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) menolak kenaikan BBM secara ekstrem. Karena menilai hal tersebut akan lebih menyengsarakan kalangan pekerja, akibat berbagai hal negatif dari *multiplier effect* yang diakibatkan kenaikan BBM. Apalagi dengan mengingat kondisi dunia usaha yang belum membaik, dikhawatirkan akan mendorong lebih banyak PHK dan pengangguran. Menurut Ketua KSPSI Kab. Bandung, Baban Warsana, penolakan kenaikan BBM secara ekstrem merupakan sikap KSPSI secara nasional. (B.40)**

20

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GA'RA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2005

Komitmen ekspor LNG Arun dialihkan ke Bontang

JAKARTA (Bisnis): Operator kilang gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*) Bontang (PT Badak NGL) dipastikan menerima transfer komitmen ekspor dari kilang Arun (PT Arun NGL Co) hingga maksimal sembilan kargo LNG selama 2005.

Hal itu dilakukan menyusul kesepakatan ExxonMobil Oil Indonesia Inc (EMOI) selaku operator lapangan gas Arun untuk menyuplai gas sekitar 115 juta kaki kubik per hari (*million standard cubic feet per day/ MMSCFD*) ke dua pabrik pupuk di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun ini.

Djoko Harsono, Kepala Divisi Pemasaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), mengatakan kesepakatan itu akan menutup kekurangan guna memenuhi komitmen ekspor LNG Arun ke sejumlah pembeli.

"Antara Bontang dan Arun sudah setuju untuk mentransfer sembilan kargo supaya Arun-nya tetap bisa bantu kekurangan pasokan pupuk [di Aceh] dan pembeli [LNG] Arun juga tidak dikurangi," ujarnya Jumat lalu.

Hal itu diungkapkannya usai menyaksikan penandatanganan perjanjian jual beli gas (PJBG) antara manajemen PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan EMOI akhir pekan lalu.

Perkembangan produksi & ekspor LNG kilang Arun dan Badak (000 ton)			
Produksi	2000	2001	2002
Arun	6.706,1	2.999,8	6.242,6
Badak	20.614,9	21.343,9	19.942,2
Ekspor			
Arun	6.747	2.822,8	6.249,7
Badak	20.243,1	21.059,7	19.964,8

Sumber: Ditjen Migas

Penandatanganan perjanjian itu memastikan pasokan ke dua pabrik pupuk yaitu PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) I dan PIM II hingga total sekitar 115 MMSCFD dengan basis harga gas US\$2,3 per *million British thermal unit* (MMBTU) selama 2005.

Transfer itu sendiri merupakan pengalihan komitmen ekspor LNG Arun ke Bontang sehingga konsumen gas Arun tetap menerima pasokan gas kendati berasal dari lapangan di Kalimantan Timur itu.

Bisnis mencatat, lapangan Arun memiliki komitmen ekspor LNG ke Jepang dan Korea Selatan sekitar 75 kargo pada tahun ini. Dengan kontrak yang diteken pekan lalu, volume ekspor Arun hampir dipastikan berkurang hingga maksimal sembilan kargo.

"Totalnya [kepastian transfer kargo] memang belum tahu, ini kan masih dalam pembicaraan. Maksimal sekitar sembilan kargo," kata Djoko.

Cari sela

Senada dengan Djoko, Kepala Bagian

Pemasaran Minyak dan Gas Bumi BP Migas Budi Indianto menambahkan belum pastinya volume kargo yang akan ditransfer itu disebabkan sudah terjadinya pengapalan LNG Bontang sepanjang 2005.

Kondisi itu, lanjutnya, menyulitkan tiga kontraktor bagi hasil (kontraktor *production sharing/KPS*)—Total E&P Indonesia, Vico Indonesia, dan Unocal Indonesia—sebagai operator lapangan Bontang untuk memenuhi kargo LNG di luar jadwal yang sudah ditentukan.

"Tiga pemilik untuk pembelian 2005 itu sudah *confirm*. Nah, untuk mentransfer [komitmen Arun] ini tunggu ada sela. LNG ini kan spesifik. Tidak bisa sembarangan. Jadi harus menyesuaikan terus."

Apalagi, tambahnya, PT PIM sendiri tidak bisa memastikan total kebutuhan gasnya pada tahun ini. "PIM I kan sedang *restart*, PIM II *commissioning*, ini naiknya bertahap."

Selain itu, Djoko menuturkan komitmen lapangan Bontang sendiri diperkirakan juga akan mengalami penurunan kendati hingga saat ini volume pengurangan itu tengah dinegosiasikan dengan pihak pembeli.

PT Pertamina, kata dia, selaku *single seller* LNG Bontang menyatakan masih dalam pembicaraan, sehingga belum dipastikan berapa jumlah pengurangan itu.

"Mereka [Pertamina] sudah *approach* dengan pembeli. Ada beberapa yang sudah akan mengurangi bagian. Diusahakan dari CPC [China Petroleum Corp] dan Kogas [Korea Gas Corp]." (06/zuf)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2005

PEMBACA MENULIS

Surat-surat harus dilengkapi dengan fotokopi identitas

Hati-hari percaloan di bisnis minyak

Untuk dapat membantu perusahaan-perusahaan minyak dan gas, beberapa bank telah mempersiapkan dana. Ada lima perusahaan yang mengajukan proposal pengajuan kredit dengan jumlah nilai pinjaman lebih dari US\$98,6 juta. Karena masih terkendala masalah jaminan maka dicari solusi lain, dengan menerapkan pola bapak angkat. Satu *big oil company* bersedia menjadi penanggung atau penjamin.

Syaratnya, semua jaminan yang akan ditentukan kepadapara penerima kucuran kredit bank, harus si *big oil company* itu yang memegang atau menguasainya. Itu merupakan pola yang cerdas. Karena dengan demikian, hanya merekalah yang akan mengetahui isi perut seluruh *oil company* yang akan meneri-

ma kredit dari bank.

Walaupun pola bapak angkat tersebut sudah diterapkan dalam membantu pengusaha kecil, cara tersebut kiranya tidak tepat bila diterapkan dalam pengucuran kredit bank kepada perusahaan minyak dan gas.

Selain kemungkinan terjadi hal yang telah disebutkan di atas, juga akan ada tambahan beban dan biaya tambahan selain bunga. Dan yang jauh lebih penting harus dihindari adalah akan timbul masalah percaloan yang seharusnya sudah dihindari dan tak perlu lagi ditumbuhkembangkan, terlebih lagi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu yang bertekad memberantas masalah kolusi, korupsi dan nepotisme.

Jakarta

TAUFIK K

22

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: B. 11

TAHUN 2005

Pejabat sementara komut Pertamina segera ditunjuk

JAKARTA (Bisnis): Pejabat pengganti sementara (pgs) komisaris utama PT Pertamina segera ditunjuk untuk mengisi kekosongan posisi itu yang sebelumnya dipegang Laksamana Sukardi.

Komisaris Pertamina Roes Aryawijaya mengatakan pgs komisaris utama Pertamina akan ditunjuk oleh komisaris perseroan.

"Komisaris Pertamina yang ada tinggal menunjuk satu diantara kami untuk menjadi pgs komisaris utama sesuai dengan anggaran dasar agar posisi yang kosong tersebut segera terisi," ujarnya akhir pekan lalu di kantornya.

Dia menjelaskan sebentar lagi komisaris BUMN migas itu akan menetapkan siapa orangnya. "Saya kira penunjukan pgs akan dilakukan dengan cepat karena memerlukan persetujuan antar komi-

saris."

Roes menolak untuk menjelaskan identitas calon pgs komut Pertamina. Kini komisaris Pertamina dipegang Roes Aryawijaya, Iin Arifin Takhiyan, Anshari Ritonga, Syafruddin Temenggung, dan Achmad Rohjadi.

Mengenai penentuan rapat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2005 Pertamina, Roes menjelaskan rapat RKAP Pertamina diundur dari jadwal semula 29 Desember 2004.

Selain penentuan RKAP 2005, jelasnya, rapat juga akan mengevaluasi pencapaian kontrak manajemen 2004.

"Salah satu indikator dalam kontrak manajemen Pertamina yang akan dievaluasi adalah laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) margin terhadap pendapatan yang tidak

boleh kurang dari angka yang ditetapkan," ujarnya.

Menyinggung RUPS pertanggungjawaban direksi Pertamina, Roes menambahkan RUPS itu akan digelar sebelum semester I/2005 berakhir setelah laporan keuangan 2004 diaudit.

Dalam rapat tersebut, ujarnya, kinerja direksi Pertamina akan dievaluasi sesuai dengan kontrak manajemen yang ditetapkan awal tahun lalu.

Sebelumnya, Komisaris Utama Laksamana Sukardi telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN migas itu.

"Saya telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai komisaris utama Pertamina kepada menteri BUMN karena tugas saya untuk mengawasi direksi itu telah rampung." (wiw)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 8

TAHUN 2005

**Gaji Karyawan
Pertamina Dipotong**

RENCANA kenaikan BBM pada awal tahun 2005, tentunya akan menambah kesengsaraan rakyat banyak, di mana angka pengangguran yang semakin naik, tingginya biaya hidup, tingginya biaya pendidikan dan kesehatan. Ini semua menjadi faktor betapa kesulitan-kesulitan terus bertambah yang kita sendiri tidak habis pikir kenapa semua ini terus terjadi. Ditambah lagi dengan musibah bencana alam yang datang silih berganti.

Alasan dinaikkannya BBM karena pemerintah tidak sanggup lagi untuk menyubsidi, di satu sisi tingginya biaya produksi, melambungnya harga minyak dunia dan di lain pihak pemerintah ingin menyelamatkan Pertamina tapi bukan rakyat.

Kalau ingin menyelamatkan Pertamina jangan dibebankan pada rakyat. Kita bisa lihat betapa besar biaya operasional di luar biaya produksi yang dikeluarkan setiap tahunnya, misalnya biaya seremonial, fasilitas-fasilitas bagi pejabatnya, biaya perjalanan, biaya promosi dan lainnya.

Apabila keuangan Pertamina dalam keadaan yang memprihatinkan sebaiknya manajemen memotong gaji karyawan pada level direksi sampai pada tingkat menengah. Janganlah pemerintah membebaskan pada rakyat, betapa besar gaji karyawan Pertamina apabila itu dilakukan sedikit banyaknya akan bisa menekan biaya operasional dan kesulitan yang dihadapi dapat dirasakan bersama.

Sudradjat
Kalibata RT 03/03, Bogor Utara

24

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 88

TAHUN 2005

Minyak bumi capai rata-rata tertinggi selama 24 tahun

LONDON (Reuters): Harga minyak bumi pada penutupan transaksi hari terakhir 2004 naik lebih dari US\$10 dibandingkan posisi 2003, namun merosot US\$11,50 di bawah rekor US\$51,94 yang diraih pada 27 Oktober.

Minyak bumi jenis *Brent crude* mencapai rata-rata US\$38,19 per barel selama 2004, naik 34% dibandingkan rata-rata 2003 senilai US\$28,48, tingkat tertinggi berdasarkan data produsen minyak BP.

Harga rata-rata tahunan jenis Brent naik lebih

dari US\$2, dibandingkan posisi tertinggi yang pernah diraih pada 1980 senilai US\$35,69.

Reli harga selama 2004 dipicu tingginya kekhawatiran soal keamanan di wilayah Timur Tengah dan Afrika.

Tingginya permintaan di China, India, dan AS telah memaksa Organisasi Eksportir Minyak Bumi (OPEC) memproduksi hingga kapasitas tertingginya dalam 25 tahun terakhir, dan hanya menyisakan sedikit kapasitas untuk situasi darurat. (maj)

25

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA
 SUARA PEMBARUAN

INVESTOR DAILY
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

Pusri Capai Produksi Tertinggi

Sejak pertengahan Desember 2004, Pusri telah mencapai produksi yang ditetapkan.

PALEMBANG — Produksi pupuk urea PT Pusri pada tahun 2004 mencapai puncak produksi tertinggi sejak pabrik pupuk tertua ini berdiri 45 tahun lalu. Produksi urea PT Pusri pada tahun mencapai 2.187.500 ton atau sekitar 104,82 persen dari target yang ditetapkan dalam RAKP (rencana anggaran kerja perusahaan).

Dirut PT Pusri Ir. Dadang Heru Kodri, MM menyatakan tahun lalu produksi Pusri 2003 sebesar 2.053.220 ton. "Pada tahun 2004 PT Pusri menargetkan produksi urea sebesar 2.087.000 ton. Namun dari kerja keras semua pihak produksi pupuk urea terealisasi sebesar 2.187.500 ton," katanya usai melakukan pengantongan terakhir produksi pupuk urea PT Pusri tahun 2004, di Palembang, akhir tahun lalu.

Menurutnya, target produksi

pupuk urea PT Pusri sudah tercapai pada tanggal 15 Desember 2004 lalu. Dalam waktu yang tersisa selama dua pekan sampai 31 Desember 2004, produksi pupuk urea mencapai angka produksi tertinggi sebesar 2.187.500 ton," ucapnya.

Selain produksi pupuk urea, prestasi PT Pusri tersebut juga terjadi pada produksi amoniak. "Produksi amoniak PT Pusri pada tahun 2004 terealisasi sebesar 1.440.150 ton atau sekitar 108,12 dari target produksi tahun 2004 yang sebesar 1.332.000," tambah Dadang Heru Kodri.

Sedangkan PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) sampai akhir tahun 2004 memproduksi sebanyak 526.899,11 ton urea. Angka itu sekitar 93,26 persen dari yang ditargetkan. Sedangkan pabrik amoniak mampu memproduksi sebanyak 347.607,99 ton atau 93,57 persen dari target yang ditetapkan.

Dirut PT Pupuk Kujang Cikampek, Drs Aas Asikin Idat Ak MM, di tempat terpisah mengatakan tidak tercapainya target produksi, disebabkan umur pabrik yang sudah mencapai usia 26 tahun sehingga terjadi beberapa

kendala terutama pada peralatan produksi.

Namun secara prinsip, kata Aas, PT PKC tetap akan menjamin ketersediaan urea pada musim tanam awal tahun 2005 ini, khususnya di 15 kabupaten/kota di Jawa Barat yang menjadi tanggung jawab pemasaran yakni Kabupaten Indramayu, Subang, Karawang, Purwakarta, Bekasi, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, termasuk Cimahi, dan Depok. "Memasuki musim tanam di Jawa barat ini PT PKC siap untuk mengamankan konsumsi pupuk agar sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi prinsip 6 tepat sehingga tidak terjadi lagi isu kelangkaan pupuk di tingkat petani," kata Aas.

Menurut Aas, kondisi itu akan berangsur terpenuhi menyusul sedang dirampungkannya pembangunan pabrik Kujang I-B yang secara keseluruhan baru mencapai 91,52 persen. Diharapkan, pada akhir tahun 2005 pabrik baru dapat dipararelkan dengan pabrik lama sehingga kebutuhan pupuk di tingkat petani di seluruh Jawa Barat dalam terpenuhi.

Pada bagian lain Dadang mengatakan Pertamina pada Januari 2005 akan menaikkan harga jual gas ke PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri). Harga jual tersebut akan naik menjadi 2 dolar AS per *million metric british thermal unit* (MMBTU).

"Sejak Januari 2005 harga jual gas dari Pertamina untuk pabrik Pusri I B sudah sebesar 2 dolar AS per *million metric british thermal unit*. Pada tahun 2005 akan menyusul kenaikan harga jual gas untuk pabrik Pusri II, Pusri III dan Pusri IV dengan harga 2 dolar AS per MMBTU," katanya.

Dadang menjelaskan, dengan adanya kenaikan harga jual gas dari Pertamina ke PT Pusri tersebut tidak otomatis akan menaikkan harga jual pupuk. "Khusus harga jual pupuk ke petani tidak akan naik, karena yang menentukan kenaikan harga pupuk bukan produsen pupuk melainkan pemerintah," ujarnya.

Karena itu, pada tahun 2005 harga jual pupuk untuk petani tetap sebesar Rp 1.050/kg. "Harga tersebut merupakan harga subsidi dari pemerintah melalui subsidi untuk pembelian gas." ocd/dcd

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

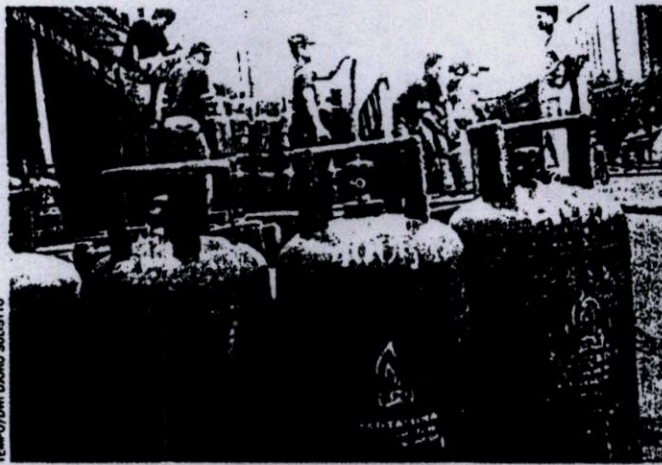
KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 106

TAHUN 2004



TEMPO/DWI DIONO SULISTYO

Kisruh Elpiji

KISRUH gas dalam tabung atawa elpiji belum su. ut. Setelah konsumen memprotes kenaikan harga jualnya yang kelewat tinggi, kini giliran pengusaha pengisian dan pengangkutan *bulk* elpiji (SPPBE), mitra PT Pertamina, yang meradang. Mereka mendesak Pertamina

menunda penerapan sistem baru setelah kenaikan harga elpiji, yakni sistem konsinyasi. Sistem baru tersebut rencananya akan mulai diberlakukan awal Januari ini.

Sistem yang baru diterapkan setelah Pertamina menaikkan harga elpiji sekitar 40 persen dua pekan lalu memang akan memangkas wewenang SPPBE. Selama ini para agen membeli elpiji dari SPPBE, sedangkan SPPBE membeli elpiji dalam bentuk

curah (*bulk*) ke Pertamina berdasarkan surat order (DO) yang dibuatnya sendiri. Dengan sistem baru, para agen akan membeli elpiji langsung ke Pertamina berdasarkan DO yang diterbitkan Pertamina. Jadi, SPPBE hanya berperan sebagai petugas pengisian.

Menurut Ketua Perhimpunan Pengusaha Elpiji Indonesia (PPEI) Abas Sudarmoko, Rabu pekan lalu, mereka tidak menolak sistem ini, tapi meminta aturan mainnya diperjelas dan tidak merugikan satu pihak, yakni SPPBE. Padahal, investasi mereka di fasilitas tangki tidak murah, sekitar Rp 11 miliar untuk kapasitas 50 ton. Dikhawatirkan sistem baru ini akan menurunkan omzet mereka dari Rp 5 miliar per bulan menjadi cuma Rp 500 juta. Pertamina beralih, sistem baru ini untuk menjamin volume gas tabung sesuai dengan labelnya. ■

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN: 21

TAHUN 2004

2005

Pasokan BBM di Pertamina UPMS III Lampau Target

JAKARTA – Sepanjang 2004, PT Pertamina Unit Pemasaran III (UPMS III) yang meliputi wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten, telah menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 15,2 juta kilo liter (kl) dengan nilai Rp 22,334 triliun, atau lebih tinggi 6,29% dari target sebesar 14,3 juta kl. Hal ini disebabkan tingginya pertumbuhan konsumsi yang mencapai 7,8%.

Menurut *General Manager* UPMS III PT Pertamina (Persero) Tjandra Putra Kelana kepada *Investor Daily* di Jakarta pekan lalu, pertumbuhan permintaan BBM jenis premium dan solar sangat dipengaruhi dengan pertumbuhan kendaraan bermotor dan industri. "Penyaluran minyak tanah tidak berubah karena jumlahnya memang telah dibatasi pemerintah yakni 3,8 juta kl," kata Tjandra.

Dia menjelaskan, BBM jenis solar terbanyak dipakai untuk sektor transportasi kendaraan motor dan mobil mencapai 3,1 juta kl, industri 1,9 juta kl, dan sisanya dipakai oleh PT PLN (Persero). Sementara premium sebagian besar dipakai ken-

daraan bermotor dan mobil. Suplai BBM UPMS III pada 2004 juga mengalami pertumbuhan rata-rata 7,8% dibandingkan pencapaian 2003 dengan suplai BBM sebesar 14,1 juta kl. Untuk premium tumbuh 8% dari sebelumnya 5 juta kl dan solar tumbuh 13,21% dari sebelumnya 3,8 juta kl. UPMS III menyalurkan 60% BBM di kawasan Jakarta, Bogor, Ta-

ngerang, dan Bekasi (Jabotabek). Sisanya disalurkan ke Jawa Barat dan Banten.

Untuk tahun 2005, Tjandra memperkirakan suplai minyak tanah di wilayah UPMS III akan dipangkas sekitar 10% dari suplai 2004 sebesar 3,8 juta kl. "Hal itu seiring dengan rencana pemerintah yang akan memangkas subsidi dan suplai minyak tanah," jelasnya.

Sedangkan untuk BBM jenis premium dan solar diperkirakan akan tetap tumbuh, seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, mobil, dan kebutuhan industri pabrik. Suplai premium diperkirakan akan mencapai 5,6-5,7 juta kl dan solar mencapai 6,3 juta kl.

Untuk mengamankan distribusi dan pasokan BBM, UPMS III akan mengambil langkah-langkah

pengamanan dan pencegahan, terutama terhadap ulah pengusaha yang menimbun dan mengoplos BBM. "Jika tidak diantisipasi, ulah penimbun dan pengoplos ini akan mengancam pasokan minyak tanah bagi rakyat," katanya.

Selain itu, UPMS juga akan berusaha mencegah agar minyak tanah yang diperuntukkan bagi rumah tangga tidak dijual ke industri pabrik.

Selama ini, pihak UPMS III sebenarnya sudah menerjunkan 50 satgas khusus untuk melakukan pengawasan. Namun dia juga berharap, Pemda masing-masing wilayah dapat ikut berperan aktif. "Kita juga bekerja sama dengan Polda Metro untuk mengawasinya,"

kata Tjandra.
(lim)



Kinerja UPMS III Pertamina 2004

Jenis BBM	Perkiraan Realisasi 2004 (kl)	Target 2004 (kl)	Realisasi 2003 (kl)	Harga BBM 2004 (Rp)	Pertumbuhan 2004 (%)	
					Thd Target	Thd 2003
Premium	5.400.000	5.000.000	5.000.000	1.810	8,00	8,00
Solar	6.000.000	5.500.000	5.300.000	1.650	9,09	13,21
Minyak Tanah	3.800.000	3.800.000	3.800.000	700		
Total Penjualan	15.200.000	14.300.000	14.100.000	22.334.000.000,000	6,29	7,80

Sumber: Pertamina UPMS III

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

JUL AGST SEPT OKT NOV DES
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 21

TAHUN 2004

2005



JUAL BELI GAS - Presdir ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) Ronald Wilson (kiri) berbincang dengan Kepala BP Migas Rachmat Sudibyo (kanan) usai penandatanganan kontrak jual beli gas dengan PT Pupuk Iskandar Muda I dan II di Jakarta, Jumat (31/12). Jual beli gas tersebut dilakukan secara bertahap, dengan total volume 113 juta kaki kubik per hari.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN	<input checked="" type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
(1) JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 (3) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 21	TAHUN 2004-2005

Buntut Musibah Tsunami

DPR Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Harga BBM

JAKARTA – Komisi VII DPR RI mengimbau pemerintah untuk menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menyusul terjadinya musibah nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Untuk itu Komisi VII DPR RI akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dan Direktur Utama PT Pertamina Widya Purnama pada sidang 10 Januari 2005.

"Sidang itu akan diprioritaskan pada janji pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM dalam bentuk apapun," kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Bulan Bintang Nizar Dahlan di Jakarta, Minggu

(2/1). Menurut Nizar pemerintah harus berhati-hati mengambil kebijakan kenaikan harga, karena akan menimbulkan reaksi yang keras dari masyarakat. Dia ambil contoh kenaikan elpiji, pertamax dan pertamax plus yang dilakukan Pertamina belum lama ini. "Sangat jelas kan, respon masyarakat. Demodemo anti kenaikan itu berhenti hanya karena ada musibah Tsunami," katanya.

Sementara itu, pengamat migas Kurtubi juga menyatakan hal yang sama. Kurtubi menyatakan, musibah gempa dan gelombang Tsunami menambah variabel baru dalam penentuan kenaikan harga BBM. "Musibah

ini memang menimbulkan kesengsaraan luar biasa. Saya berharap sebaiknya pemerintah jangan dulu menaikkan harga BBM pada Januari ini, setidaknya sampai kondisi sosial ekonomi masyarakat pascabencana itu pulih," jelasnya.

Menurut dia, saat ini, lebih baik pemerintah memfokuskan perhatian pada pemulihan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Aceh dan sekitarnya. Namun, Kurtubi mengaku cepat atau lambat harga BBM harus tetap dinaikkan dengan cara mencabut subsidi. Hal ini mengingat beban negara terlampau besar untuk menanggung subsidi tersebut.

"Mungkin setelah 3 minggu

atau sampai kondisi Aceh direhabilitasi. Ini harus dibarengi dengan upaya sosialisasi," ujarnya. Dia juga berharap, kebijakan harga BBM ini ditangani secara terpadu dan komprehensif antara kebijakan ekonomi jangka panjang dan pengembangan energi nasional.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy menyatakan, pencabutan subsidi dapat berdampak naiknya inflasi akibat kenaikan harga-harga barang di pasar sekitar 5%-25%. "Inflasi ini akan diikuti dengan berkurangnya daya beli sehingga kemiskinan pun akan meningkat, apalagi dalam kondisi tertimpa musibah seperti saat ini," paparnya,

Sementara itu, hingga saat ini Pertamina belum mengumumkan harga BBM periode Januari 2005. Padahal, biasanya setiap tanggal 1 Pertamina mengeluarkan rilis mengenai harga BBM bulanan.

Menurut juru bicara Pertamina, M Harun, pengumuman harga BBM baru akan dilakukan hari ini (Senin 3/1). "Semua tim Pertamina masih dengan situasi Aceh," kata Harun.

Menurut dia, harga BBM periode Januari kemungkinan tidak jauh berbeda dengan harga periode Desember 2004. "Secara prinsip harga BBM Januari masih menggunakan ketentuan SKB tiga menteri," kata Harun.

(c63)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

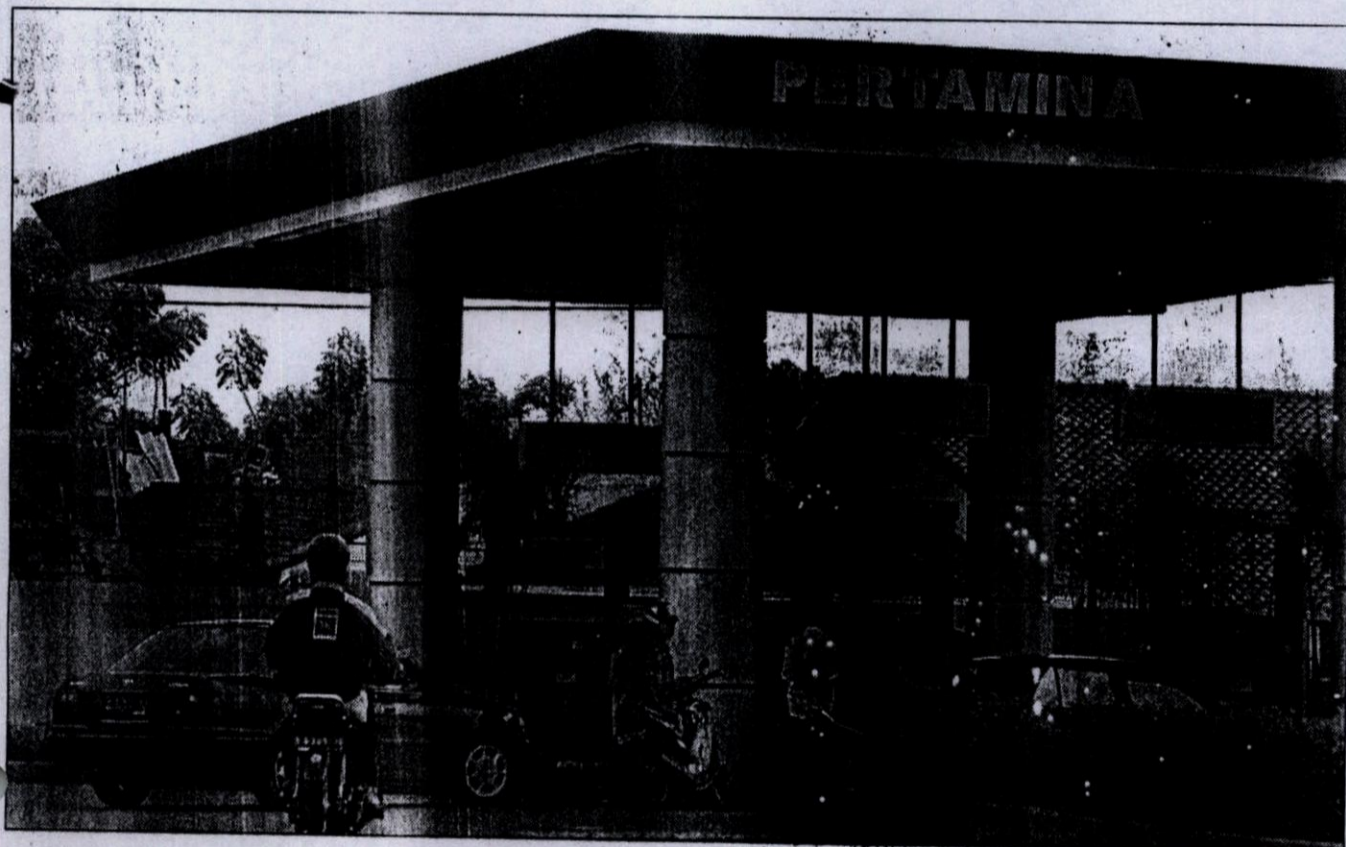
GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 21

TAHUN 2004

2005



KENAIKAN BBM - Pada 2005 pemerintah merencanakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 40%. Namun, khusus untuk BBM jenis minyak tanah bagi rakyat diperkirakan akan tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Tampak aktivitas di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 21

TAHUN 2004

200

Pertamina Segera Teken SK Konsinyasi Elpiji

JAKARTA - Meskipun mendapat protes dari kalangan pengusaha, manajemen PT Pertamina (Persero) akan menandatangani surat keputusan (SK) mengenai pola konsinyasi distribusi elpiji. Dalam SK tersebut antara lain ditetapkan besaran *fee* Rp 125 per kg untuk pemilik stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE), mitra Pertamina. Ketetapan ini diharapkan berlaku akhir Januari 2005.

"Bagi pengusaha yang tidak mau mengikuti pola konsinyasi, ya silakan saja. Tapi, kita akan tetap memberlakukan kebijakan ini," kata *General Manager Gas Domestik Pertamina* Ahmad Faisal kepada *Investor Daily* di Jakarta pekan lalu.

Faisal membantah anggapan bahwa pemberlakuan pola konsinyasi ini tergesa-gesa dan tanpa sosialisasi sebelumnya. Menurut dia, pihaknya telah beberapa kali berdialog dan menjelaskan pola konsinyasi yang akan diberlakukan ini kepada para pengusaha. "Bahkan, *draft* SK ini sudah kita perlihatkan kepada pengusaha SPPBE. Jadi, mereka sebenarnya sudah tahu," jelas Faisal.

Menurut dia, pola baru ini

akan langsung diberlakukan untuk mengganti pola lama yakni sistem jual beli putus, yang tertuang dalam setiap kontrak kerjasama antara Pertamina dan pengusaha. Namun, dia tetap membuka peluang bagi pengusaha yang belum bersedia merevisi kontrak sampai masa berlaku kontrak lama berakhir. "Namun, setelah kontrak lama berakhir Pertamina hanya akan memberlakukan pola konsinyasi," tegasnya.

Selama ini, pola kerja sama Pertamina dengan pengusaha SPPBE menggunakan pola kemitraan jual/beli putus. Dalam kerjasama ini, Pertamina menjual putus elpiji kepada SPPBE, selanjutnya menjadi hak SPPBE untuk mengurus dan memasarkannya. Umumnya, SPPBE menjual elpiji kepada *dealer*, sebelum sampai ke konsumen.

Sementara itu, pada pola konsinyasi Pertamina langsung menjual elpiji kepada *dealer* melalui bank. SPPBE hanya bertugas sebagai perantara terminal yang menerima jasa *fee* untuk mengisi elpiji para *dealer*. Selanjutnya, *dealer* menjual kepada konsumen.

Faisal menjelaskan, pihaknya bertekad tetap memberlakukan

pola konsinyasi karena umumnya SPPBE di Indonesia dimiliki oleh para pengusaha elpiji, bukan Pertamina. Sementara di luar negeri, SPPBE dimiliki oleh prinsipil atau pemilik elpiji. Melalui pola konsinyasi ini, kata Faisal, diharapkan akan ada peningkatan efisiensi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengusaha SPPBE yang tergabung dalam Perhimpunan Pengusaha Elpiji Indonesia (PPEI) mempertanyakan pola pemasaran konsinyasi elpiji ini. Menurut Ketua Umum PPEI Abas Sudarmoko P, pola konsinyasi ini menyakiti mitra kerja karena mengurangi peran pengusaha SPPBE.

Dia juga menilai, *fee* konsinyasi Rp 125 per kg tidak sesuai dengan keinginan pengusaha SPPBE yakni sekitar Rp 185 per kg.

Walau kecewa, PPEI akan membebaskan anggotanya untuk menerima atau menolak pola konsinyasi. Jika konsinyasi tetap diberlakukan, PPEI hanya berharap penerapannya dilakukan secara bertahap. Abas juga mengingatkan, pola tersebut bisa menimbulkan birokrasi dan memicu KKN baru.

(lim)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 21

TAHUN 2004

ExxonMobil Pasok Gas ke Aceh

JAKARTA – PT ExxonMobil Oil Indonesia menyatakan komitmennya untuk kembali memasok gas bagi PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), sebesar 57 juta kaki kubik per hari (*million standart cubic feet per day/mmscfd*) dengan harga US\$ 2,3 per mmbtu (*metric british thermal unit*). Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan pasokan gas di Jakarta pekan lalu.

Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) Rachmat Sudibyo mengatakan, perjanjian yang dilakukan ExxonMobil dan PIM ini adalah salah satu bentuk perjanjian yang sudah dilaksanakan selama 30 tahun. Perjanjian ini, kata Rachmat merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi pasokan gas ke beberapa pabrik di Aceh, yang sebelumnya sempat tersendat. Selain ke PIM, Indonesia juga memasok gas dalam bentuk LNG ke Jepang dan Korea. (c63)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3

TAHUN 2004

Dinamika Pertamina

Kenaikan Harga BBM Ganggu Likuiditas Gerakan Koperasi

Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Jawa Tengah menghimbau agar rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 40 persen dapat ditunda. Setidak-tidaknya khusus BBM yang dikonsumsi masyarakat luas seperti minyak tanah dan premium tidak dinaikkan terlebih dulu. "Kalau kenaikan harga BBM tetap dilaksanakan, hal itu bisa mengganggu likuiditas koperasi-koperasi yang ada di Jateng," kata Ketua Umum Dekopin Jateng Herman Sukirno, kemarin. Kebanyakan anggota koperasi di Jawa Tengah, bergerak pada sektor usaha kecil seperti penjual panganan goreng maupun perajin industri kecil lainnya yang sangat mengandalkan bahan bakar terutama minyak tanah. Kalau BBM tetap naik otomatis beban mereka bertambah berat. Dan dampaknya akan sangat mempengaruhi perputaran keuangan mereka yang selama ini hidup mengandalkan pinjaman dari koperasi. Kondisi tersebut akan semakin parah apabila mereka kemudian kesulitan membayar angsuran koperasi.

Herman Sukirno mengemukakan, di Jawa Tengah saat ini tercatat ada 14.300 unit koperasi dengan anggota

mencapai ratusan ribu orang. Jumlah koperasi ini pada 2005 diperkirakan akan membengkak menjadi 15.000 unit. Nilai pinjaman yang diberikan kepada para anggota rata-rata dibawah Rp 5 juta.

Lembaga pembiayaan terhadap koperasi untuk UKM dewasa ini cenderung semakin beragam. Untuk UKM di Jateng khususnya yang berada dalam sentra-sentra industri kecil sejak 2001 sampai 2003 telah memperoleh dukungan Modal Awal dan Padanan (MAP) sebesar Rp 19,5 miliar. Kredit yang dianggarkan melalui dana APBN itu disalurkan melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Kop) yang tersebar di berbagai wilayah di Jateng, dengan rata-rata pinjaman Rp 10 juta sampai Rp 15 juta.

Dengan adanya dana MAP, kata Herman, paling tidak mampu mengatasi perkara di tubuh koperasi dan UKM yang selama ini sulit mendapat kucuran dana kredit terutama dari bank-bank umum. Selain terkendala masalah permodalan, tingginya suku bunga kredit juga menjadi hambatan bagi UKM dalam memperoleh modal dari bank umum.

"Untuk meningkatkan kinerja ko-

operasi ke depan, Dekopin Jateng akan kembali menggelar berbagai program kerjasama. Pada 2004 lalu, Dekopin telah mengadakan mediasi dengan beberapa BUMN seperti PT PLN, PT Telkom dan Perum Bulog," tandas dia.

Menuju Liberalisasi

Ke depan, pemerintah sudah memasang ancang-ancang untuk menerapkan kebijakan energinya, terutama bahan bakar minyak (BBM) yang tidak lagi disubsidi, tapi kian mengarah menuju liberalisasi mengikuti perkembangan pasar.

Upaya-upaya ke arah itu telah beberapa kali didengungkan oleh pejabat tinggi negara mulai dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menko Perencanaan, Aburizal Bakrie, Menkominfo, Sofyan Djalil, bahkan Wapres Jusuf Kalla yang beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Pemerintah akan menaikkan harga BBM sekitar 10 sampai 40 persen.

Purnomo Yusgiantoro, dalam paparan *blue print* kebijakan energi 2005 menerangkan bahwa Pemerintah kini tengah menyiapkan liberalisasi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap yang dimulai dengan tahapan transisi

mulai 2005 sebagai masa semi-liberalisasi dan menuju tahapan pemantapan di tahun 2010 sebagai masa liberalisasi secara menyeluruh.

Pada tahapan masa semi liberalisasi bisa saja per produk BBM, namun bisa juga per lintas sektoral (cross section). Untuk semi-liberalisasi mungkin dilakukan pada minyak bakar, diesel, dan premium. Tapi terhadap minyak tanah dan solar karena harga subsidi cukup besar maka dilakukan bertahap.

Bahkan Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie menyatakan, kenaikan harga BBM pada 2005 semakin cepat dilakukan akan semakin baik dan bila itu dilakukan sebaiknya pada masa panen sehingga tidak membuat gejolak inflasi.

Berbagai alasan pula disampaikan oleh pemerintah bahwa subsidi BBM tersebut disamping memberatkan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) akibat harga minyak mentah di pasar internasional terus meningkat hingga di atas 40 dolar AS per barel, juga bisa menjadi kurang baik dalam kehidupan masyarakat di negeri ini.

Dengan adanya subsidi BBM, maka akan tercipta disparitas harga sehingga mendorong terjadinya praktek pengoplosan dan penyeludupan. Bahkan dalam pengamatan pemerintah, keberadaan subsidi BBM yang telah mencapai Rp 72 triliun itu juga menimbulkan ketidakadilan karena kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi lebih menikmati subsidi ketimbang yang dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam paparan data dan fakta berkaitan dengan reformasi harga BBM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Sofyan Djalil berpendapat subsidi BBM yang tidak bersasaran justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat kaya dibanding masyarakat berpenghasilan rendah.

Kelompok masyarakat berpenghasilan tertinggi rata-rata menikmati subsidi BBM sebesar Rp 393.000 per tahun, sedangkan kelompok masyarakat berpenghasilan terendah rata-rata hanya menikmati subsidi sebesar Rp 72.500 per tahun.

Perhitungan tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan rata-rata konsumsi BBM per orang per tahun pada masing-masing kelompok berdasarkan data Susenas 2003 dengan selisih antara harga yang berlaku dengan harga berdasarkan harga internasional (minyak tanah Rp 3.740, bensin Rp

3.425, dan solar Rp 3.582 per liter).

Subsidi BBM justru akan lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan yang lebih tinggi karena distribusi konsumsi BBM dan minyak tanah semakin besar untuk kelompok masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi.

Disebutkannya, 60 persen kelompok penduduk yang terdiri dari kelompok menengah hingga atas mengkonsumsi sebesar 84 persen dari distribusi BBM dan 74 persen dari jumlah minyak tanah yang didistribusikan.

Tepat guna

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya energi di Indonesia, terutama minyak yang dalam beberapa tahun terakhir ini semakin berkurang, pengurangan subsidi BBM dimaksudkan agar pemanfaatan sumber minyak di dalam negeri dapat lebih tepat guna.

Cadangan minyak Indonesia semakin berkurang dan apabila tidak ditemukan cadangan terbukti (proven reserve) maka dalam kurun waktu 11 tahun ke depan Indonesia bisa jadi pengimpor seluruh kebutuhan minyak mentah dan BBM. Jadi, hal itulah pula yang membuat pemerintah berusaha mengurangi subsidi.

Direktur Sumber Daya Mineral Bappenas, Bemby Uripto menambahkan bahwa pengurangan subsidi akan membuat pemanfaatan energi lainnya lebih ditingkatkan seperti energi geothermal, batubara, gas, dan lainnya.

Sumber energi bukan hanya minyak bumi, tapi ada batubara, gas alam, panasbumi, dan lainnya. Seandainya BBM dinaikkan, maka energi lainnya bisa mendorong pemanfaatannya.

Briket batubara sejak tahun 1993 sudah dibuat, tapi sampai saat ini kurang bisa dimanfaatkan masyarakat, karena kalah bersaing dengan produk BBM lainnya yang disubsidi pemerintah.

Selain itu, subsidi harga BBM yang menjadikan disparitas harga juga mendorong penyeludupan ke negeri lain, yang tentunya akan lebih menguntungkan negara lain itu. Apalagi produk BBM seludupan tersebut dipergunakan untuk kegiatan produksi, maka dapat mengurangi daya saing produk Indonesia, karena biaya produksinya mempergunakan BBM yang disubsidi.

Di bagian lain, dengan pengurangan subsidi BBM diperkirakan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang jumlahnya cukup besar, karena

Pemerintah telah mempersiapkan dana kompensasi yang akan disalurkan kepada sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengadaan beras miskin.

Dana kompensasi seperti yang disebutkan oleh Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie nilainya sekitar Rp10-15 triliun, akan dibagikan ke sejumlah sektor, di antaranya ke sektor infrastruktur yang diperkirakan mencapai Rp3-5 triliun. Di sektor infrastruktur akan terjadi pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan ataupun lainnya yang membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar.

Begitu pula sektor pendidikan, pembangunan sekolah-sekolah di sejumlah daerah juga akan membutuhkan banyak pekerja, bahkan di sektor kesehatan akan dibangun sejumlah puskesmas, termasuk mendatangkan tenaga medis ataupun bidan yang sekarang ini jumlahnya sangat minim, jauh di bawah kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan pengurangan subsidi tersebut, nantinya juga akan menciptakan lapangan kerja baru di dalam negeri dan juga upaya pemanfaatan energi yang ada bisa tetap guna. (Pdy/Ant)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2005

Tahun 2005 Target Produksi LNG Arun Turun, Cuma 73 Kapal

LHOKSEUMAWE (Suara Karya): Manajemen PT Arun NGL Co memproyeksikan produksi kilang gas alam cair (LNG) tersebut tahun 2005 turun signifikan menjadi 73 kapal atau setara dengan 9,125 juta M3. Hal ini, terjadi karena berakhirnya kontrak penjualan LNG Arun-II dengan buyer Jepang Barat pada akhir 2004. Dengan demikian, praktis konsumen tetap LNG Arun saat ini tinggal buyer Jepang Timur dan Korea Selatan.

"Tahun ini kontrak kita dengan Jepang barat berakhir, sehingga kapasitas produksi kita turun signifikan menjadi 73 cargo tahun depan," ujar Pejabat Presiden Direktur PT Arun NGL Co, Aknasio Sabri kepada wartawan usai melepaskan MV. Dewa Maru sebagai tanker akhir tahun 2004 di Pelabuhan LNG Arun, Jumat (31/12) pagi.

Menurut Aknasio, penurunan produksi LNG Arun tahun 2005 mendatang cukup signifikan sehingga PT Arun terpaksa mengadakan satu kilang (train) lainnya, sehingga praktis kini tiga dari enam train yang ada harus diistirahatkan, padahal kemam-

puan produksinya masih cukup bagus.

Sebenarnya menurut Aknasio, dengan operasional tiga train pun tahun 2005 Kilang Arun mampu memproduksi hingga 109 kapal. Namun, sayang pihak produsen (ExxonMobil, Inc) hanya mampu memasok untuk kapasitas 73 kapal, karena ada kewajiban mensuplai kebutuhan industri pupuk sebanyak enam kapal.

Padahal, tambah Aknasio pada tahun 2005 Indonesia berkewajiban mensuplai sebanyak 75 kapal LNG untuk sejumlah Negara buyer, karenanya terdapat kekurangan sebanyak dua kargo yang harus di swap dari Negara produsen lainnya.

Dalam sambutannya, saat melepas tanker LNG terakhir 2004 Aknasio mengatakan cargo tersebut adalah pengapalan LNG ke 3.918 jika dihitung sejak beroperasinya kilang LNG Arun pada 1978 lalu.

"Target pengapalan tahun 2004 adalah 103 kapal atau setara dengan 5,84 juta ton LNG, masing-masing 53 kargo untuk Jepang dan 50 kargo untuk buyer Korea," katanya.

Bantuan Bencana

Sementara itu, manajemen PT Arun juga telah menyiapkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam gempa bumi dan tsunami Aceh sebanyak Rp 4 miliar. Bantuan yang berasal dari pihak perusahaan, Badan Dakwah Islamiah (BDI) dan Serikat Pekerja (SP) dan para keluarga karyawan itu, diserahkan dalam bentuk bahan makanan, minuman, pakaian dan obat-obatan.

Sebagian bantuan tersebut telah disampaikan kepada para korban di Kabupaten Aceh Utara, Pemkot Lhokseumawe dan Bireun. Sedangkan untuk para korban di Banda Aceh, telah didirikan Posko di kawasan Ulee Kareng, sebab dipadu dengan Posko Kesehatan.

Katanya, Posko Kesehatan PT Arun nanti akan ikut dibantu sekitar 200 tenaga medis, peralatan kedokteran dan obat-obatan bantuan Pemerintah Jepang yang akan tiba dalam dua hari ini di Aceh.

"Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Jepang melalui buyer LNG Arun negeri itu," tandas Aknasio didampingi Manager Divisi I, Riswan Zakarya. (Ham)

35

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 4

TAHUN 2004

Telekomunikasi Berangsur Pulih

Pertamina Kirim Solar dan Minyak Tanah ke Banda Aceh

Jakarta, Sinar Harapan

PT Pertamina (Persero) mulai Jumat (31/12) kembali mengirimkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar dan minyak tanah sebanyak 6 kiloliter dan disebar ke posko-posko yang ada di Banda Aceh. Perusahaan juga hari ini akan mengirimkan 20 kiloliter BBM jenis avtur gratis bagi pesawat-pesawat SAR (*Search And Rescue*).

Untuk mengurangi antrian yang terjadi di dua SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Banda Aceh, Pertamina akan membuka penjualan secara konvensional untuk premium dan solar. Sementara untuk distribusi ke kota Meulaboh, BUMN itu berencana bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut mengangkut drum-drum berisi BBM dengan kapal LST (*Landing Ship Tank*). Humas Pertamina, Mochammad Harun menyatakan hal itu kepada SH di Jakarta, Jumat (31/12) pagi, berkaitan dengan situasi terakhir penyaluran BBM di Aceh.

"Kemarin dari Lhokseumawe kita kembali mengirimkan 166 kiloliter premium ke Banda Aceh, 40 kiloliter solar dan 35 kiloliter minyak tanah. Itu ditambah dengan kiriman dari Medan sebanyak 78 kiloliter premium dan 66 kiloliter solar," ujarnya. Sementara untuk menambah persediaan minyak avtur di bandara, Pertamina katanya, hari ini mengirimkan sebanyak 20 kiloliter setelah kemarin memasok avtur

sebanyak 50 kiloliter. Untuk BBM jenis avtur, Harun menegaskan diberikan gratis bagi pesawat-pesawat yang melakukan kegiatan SAR.

Ia menyebutkan, total BBM yang telah dikirimkan ke Banda Aceh sejak Senin (28/12) sebesar 288 kiloliter premium, solar (228 KL) dan minyak tanah 40 KL. Sedangkan untuk memasok kebutuhan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) Leung Bata di Banda Aceh, Pertamina katanya lagi, telah memasok 160 KL dari Medan dan Lhokseumawe.

Pertamina Peduli

Pada kesempatan itu Harun menyatakan, hari ini Pertamina menyebarkan minyak solar dan minyak tanah ke sentra-sentra Posko. Jumlahnya tidak kurang dari 6 kiloliter (30 drum). Dan ia memastikan, selain minyak tanah yang dibagikan gratis, solar dan premium yang dijual di SPBU atau penjualan konvensional, harganya tidak naik.

"Saya kira kami tidak menaikkan harga. Pertamina

tetap menjual BBM sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi terjadi antrean di SBPU, saya kira itu benar dan kita berupaya mengurangnya," terang Harun. Caranya, katanya, dengan menjual BBM secara konvensional dimana mobil-mobil tangki Pertamina berhenti dan menjual kepada masyarakat secara langsung.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya akan bekerjasama dengan TNI AL untuk membawa pasokan BBM ke kota Meulaboh yang masih sulit dijangkau. Selain itu Pertamina jelas Harun, juga telah mengerahkan relawan yang diperkerakan sedang dalam perjalanan ke kota tersebut.

Secara khusus ia memaparkan, program Pertamina Peduli kemarin (30/12) mencarter pesawat udara Fokker-100 milik Pelita Air Service untuk mengirimkan bantuan barang-barang seperti obat-obatan, bisuit, susu cair siap minum, pakaian, perlengkapan wanita, serta tim relawan yang melibatkan Wanadri dan Tim Medis untuk mensurvei tahapan bantuan berikutnya. Disamping itu Pertamina juga akan mendirikan dapur umum, poliklinik Pertamina Peduli di beberapa kota, rehabilitasi sarana dan prasarana umum.

Telekomunikasi

Sementara itu dilaporkan, jaringan telekomunikasi selu-

lar milik PT Indosat Tbk di kota Banda Aceh berangsur pulih sejak Kamis (30/12) malam. Dengan demikian empat buah BTS (*Base Transmitter Station*) sudah kembali beroperasi yakni di TVRI Banda Aceh, Cot Leupon, TVRI Sabang dan Sabang.

"Sejak terjadinya badai tsunami, kami langsung terjun ke lapangan dan memperbaiki jaringan telekomunikasi agar masyarakat bisa kembali berkomunikasi," ujar Hasnul Suhaimi, Direktur Pemasaran Selular Indosat dalam siaran pers yang diterima SH di Jakarta, Jumat (31/12).

Ditambahkannya, keempat BTS itu masih beroperasi sementara dengan kapasitas terbatas. Karenanya ia meminta pengertian dari masyarakat bila layanan komunikasi melalui Indosat nantinya masih mengalami kendala.

Hasnul mengungkapkan, Indosat sebelumnya memiliki 33 BTS di seluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Khusus di kota Banda Aceh terdapat 16 BTS dan 1 BSC (*Base Switching Center*).

Sebagai bentuk pelayanan bagi pelanggan, Indosat jelasnya, diantaranya memberlakukan pengurangan tarif sebesar 75 persen bagi masyarakat Aceh pengguna Indosat, memberikan tambahan pulsa otomatis Rp 100.000 bagi pelanggan Mentari di Banda Aceh dan Lhokseumawe. (rvs)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2005

Amankan BBM Di Aceh, Ditempuh Jalur Darat

Meski kendala yang dialami cukup berat, namun ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kebutuhan yang vital bagi masyarakat Aceh guna memenuhi kebutuhannya.

Menurut laporan kondisi yang terjadi pascabencana, dari empat Depot BBM dan satu Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Bandara yang beroperasi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) hanya tiga yang dapat beroperasi yaitu Depot BBM, Lhok Seumawe, Depot Sabang dan DPPU Bandara Iskandar Muda. Depot Kreung Raya (Banda Aceh) dalam kondisi hancur dan tidak dapat beroperasi, sementara Depot Meulaboh hancur karena keadaan kota Meulaboh 85 persen hancur.

Sedangkan DPPU di Iskandar Muda, hanya mempunyai stok Avtur sebanyak kurang lebih 200.000 liter, tak dapat di suplai lagi melalui laut, karena kondisi dermaga di Depot Kreung Raya tidak dapat dioperasikan. Saat ini DPPU Sultan Iskandar Muda tidak dapat melaksanakan pengisian (*refueling*) untuk semua pesawat komersial, dan stok avtur yang ada hanya digunakan untuk pengisian pesawat dengan tujuan evakuasi pascagempa.

Sehubungan dengan kerusakan yang

terjadi di Depot Pertamina Kreung Raya (Banda Aceh) dan Meulaboh, pasokan BBM di wilayah Aceh dilakukan melalui Depot Lhok Seumawe.

Juru bicara Pertamina, M Harun mengatakan, Minggu (2/1), Pertamina telah mengirimkan kembali pasokan BBM ke Aceh melalui darat dari Medan untuk menutupi kebutuhan BBM masyarakat Aceh. Untuk premium sebanyak 66 kilo liter (KL), Solar 64 KL dan Avtur 36 KL. "Kebutuhan BBM yang normal di Aceh hanya berkisar 60 sampai 70 KL, tapi ini kan kondisi yang darurat sehingga harus dilakukan pengamanan," ujarnya.

Menurutnya, dari kondisi yang ada di Meulaboh dikabarkan ada dua tanki BBM yang aman dan siap beroperasi di mana masih mempunyai persediaan Premium 610 KL dan minyak tanah 1100 KL. Sedangkan tanki-tanki lainnya bergeser.

Menyangkut tambahan pasokan baru yang telah dikirimkan, Harun mengatakan, BBM tersebut akan ditaruh di dalam drum yang siap melayani masyarakat di SPBU maupun di Posko bencana di Aceh. "Untuk Avtur juga ditempatkan di drum yang diletakan di bandara," ujarnya.

Harun menambahkan, sejak terjadi bencana Senin (27/12), Pertamina telah mengirimkan BBM dari Lhok Seumawe ke

Banda Aceh melalui jalan darat, serta menambah 35 armada tangki dari Medan dan 6 dari Pakanbaru. Hingga saat ini jumlah BBM yang telah dikirimkan ke Banda Aceh sebesar premium (1.347 KL), solar (912 KL) dan minyak tanah (213 KL).

Khusus minyak tanah, diberikan secara gratis kepada masyarakat dan untuk Avtur pesawat/heli Tim SAR juga diberikan secara gratis. Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Leung Bata (Banda Aceh), Pertamina telah memasok 160 KL solar dari Medan dan Lhok Seumawe.

Untuk mengamankan persediaan BBM di Depot Lhok Seumawe yang berfungsi sebagai *home base* penyaluran, Pertamina juga telah menambah pasokan 1.400 KL Premium, 2.600 KL minyak tanah dan 3.600 KL solar melalui tiga kapal tanker MT Warembungan (mengangkut 1.300 KL minyak tanah & 1200 KL Solar), MT Pancoral (mengangkut 1400 KL Premium & 1200 KL Solar) serta MT Galuh P (mengangkut 1300 KL minyak tanah & 1200 KL Solar).

Sebagai langkah lanjutan, Pertamina akan menyiapkan Terminal Kabung Padang yang akan direncanakan berfungsi sebagai *alternative base terminal* untuk melakukan distribusi *ship to ship* (STS) ke tongkang atau LCT untuk

suplai ke Banda Aceh dan Meulaboh. Sementara menunggu persiapan tersebut, Pertamina tetap melakukan optimalisasi distribusi melalui darat dengan mobil tangki.

Serahkan Bantuan

PT Pertamina (Persero) menyiapkan bantuan senilai Rp. 15 Miliar untuk membantu korban bencana Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan sebagian daerah Sumatera Utara Minggu yang telah dikumpulkan sejak terjadinya bencana tersebut (26/12).

Selain bantuan, hingga saat ini juga masih dilakukan pengumpulan bantuan sukarela dari para pekerja di lingkungan Pertamina dan Anak Perusahaannya. Keseluruhan bantuan akan disatukan dalam program 'Pertamina Peduli' untuk meringankan beban yang menimpa di wilayah yang tertimpa musibah.

Hingga saat ini Pertamina kehilangan 25 kepala keluarga (KK) beserta beberapa anggota keluarga di Banda Aceh dan terjadi kerusakan yang sangat berat pada kedua Depot Pertamina di Krueng Raya (Banda Aceh) dan Meulaboh.

Jajaran Direksi dan segenap pekerja Pertamina telah berkomitmen menyisihkan sebagian dari gajinya untuk dipo-

tong dan diberikan kepada Aceh. Pengiriman bantuan ini juga dilengkapi dengan bantuan yang berhasil dikumpulkan di Posko Pertamina Peduli.

Bantuan berupa obat-obatan, biskuit susu cair siap minum, pakaian, perlengkapan wanita, serta tim relawan yang melibatkan Wanadri dan Tim Medis untuk mensurvei tahapan bantuan selanjutnya, diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menggunakan pesawat udara carter jenis Fokker-100 Pelita Air Service, Kamis (30/12).

Bantuan lain yang merupakan bagian dari komitmen bantuan Rp. 15 miliar ini diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan, minuman, pendirian dapur umum, pembukaan Poliklinik Pertamina Peduli di beberapa kota di NAD, serta untuk rehabilitasi sarana dan prasarana umum.

Dibagian lain sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam meringankan beban yang diderita para korban kebakaran yang terjadi di Kelurahan Silaberanti, Unit Pengolahan III Plaju memberikan bantuan berupa 11 ton beras dan 110 dus mie instan beberapa waktu lalu.

Bantuan senilai lebih kurang Rp. 15 juta diserahkan *General Manager* Unit Pengolahan III Plaju M. Herjanto S. kepada Camat Seberang Ulu I Supuad di Posko kebakaran. (R-1)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2005

KENAIKAN harga bahan bakar minyak memicu kecemasan yang meluas akan naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Pengalihan subsidi ke sektor lain yang aman dari penyelewengan dan salah sasaran dipertanyakan ketepatgunaannya. Ada yang mengusulkan agar subsidi juga ditujukan khusus kepada kendaraan angkutan umum sehingga warga miskin penggunaanya tertolong. Ada pula yang menyebut ungkapan bergaya arogan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai "ucapan pedagang" dan tidak layak disampaikan oleh seorang pejabat tinggi pemerintah.

BBM Naik Rakyat

Sengsara

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah suatu kebijakan yang tidak populer di masyarakat. Kebijakan itu pasti akan menyengsarakan masyarakat kecil berpenghasilan rendah atau pas-pasan, termasuk para pensiunan yang untuk biaya hidup minimal sehari-hari saja kurang. Kenaikan harga BBM jenis apa pun pasti akan diikuti dengan kenaikan semua harga barang kebutuhan sehari-hari atau "sembako" (sembilan bahan pokok), termasuk angkutan bagi rakyat golongan ekonomi lemah. Apa pun konsep pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke subsidi untuk anggaran lain hanyalah teori belaka dan isapan jempol saja. Bukti atau fakta itu selama ini bisa terlihat, rakyat kecil tetap menderita. Kalau kemudian ada kenaikan gaji pegawai, bagaimana dengan rakyat kecil yang tidak mempunyai penghasilan tetap termasuk pensiunan?

Saya mengimbau agar pemerintah meninjau kembali pos-pos anggaran rutin dan pembangunan yang bisa dipangkas, antara lain gaji pejabat tinggi pemerintah, termasuk gaji anggota DPR maupun DPRD. Juga pangkaslah biaya perjalanan dinas yang tidak perlu baik di dalam negeri maupun luar negeri, ataupun belanja barang yang tidak perlu. Uang lauk pauk (ULP) TNI/Polri mestinya hanya untuk prajurit yang bertugas tempur dan operasional, antara lain kapal perang yang melakukan pelayaran, tugas jaga, dan pendidikan. Anggota TNI/Polri yang bertugas di staf adalah sama fungsinya dengan pegawai PNS biasa sehingga pemberian ULP bagi TNI/Polri tersebut akan menimbulkan kesenjangan antara anggota TNI/Polri dan PNS yang dinas di staf yang sama. Tolong pangkas pos-pos pembangunan yang prioritasnya rendah. Tingkatkanlah penghasilan badan usaha milik negara dan awasilah anggaran pemerintah, yang rawan dari tindakan korupsi yang dilakukan baik oleh oknum PNS maupun TNI/Polri.

W SURONO
Purwosari, Purwokerto

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2005

Kementerian LH Tuduh CNOOC yang Lakukan Pencemaran

"Penyidikan tidak dihentikan," tandas Darsono.

Staf pada Kementerian Lingkungan Hidup (LH) itu menegaskan hal tersebut di hadapan Rachmat Witoelar, bosnya sekaligus menjawab pertanyaan dari aktivis lingkungan yang membentuk koalisi peduli Kepulauan Seribu terhadap upaya penegakan hukum berkait pencemaran di sana. Dalam kurun waktu setahun ini, limbah minyak mencemari kawasan tersebut.

Para aktivis itu, pada Selasa (21/12) lalu, diterima Menteri LH Rachmat Witoelar. *Hearing* dengan menteri bertujuan untuk membicarakan penanganan masalah lingkungan di kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu, Jakarta, dan menanyakan sejauh mana pengusutan terhadap perusahaan maupun pelaku yang merusak lingkungan.

Pertemuan itu menjadi sangat penting karena untuk kembali menguji komitmen pemerintah baru terhadap masalah lingkungan. Sebab yang kerap terjadi, kasus-kasus lingkungan tak pernah tuntas proses hukumnya, sehingga para pelakunya tak pernah jera. Bahkan, menurut Andry Wijaya, aktivis lingkungan dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), perusahaan-perusahaan yang tak mengelola limbahnya dengan baik tidak mau transparan dalam proses penyelesaian pencemaran.

"Mereka tidak mau membuka kepada publik tentang kualifikasi mereka. Seharusnya sidik jari minyak yang ada dalam pustaka minyak itu bisa diketahui publik. Mereka

menggunakan sidik jari itu untuk menjual minyak kepada pihak lain," katanya.

Selain itu, perusahaan penambang minyak tak pernah mau jujur mengakui kendisi pipa minyak yang digunakan. "Mereka tidak pernah mau bilang, apakah pipa-pipa mereka masih kuat atau tidak, jika dugaan kebocoran dari pipa, atau terjadi kebocoran pada pengisian ke kapal tanker."

Khusus dalam kasus lingkungan di Kepulauan Seribu, para aktivis juga menerima informasi bahwa telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan baik oleh pihak kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kementerian LH. Pertanyaannya, sebagaimana disampaikan Ded Nurdin Sadat, dari ICEL, bagaimana koordinasi antarkeduanya, karena terdengar kabar pihak kepolisian justru mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

"Padahal mereka sama-sama mengetahui telah terjadi pencemaran yang memerlukan tindakan atau penanganan yang segera," ujarnya. Ia mengingatkan, masyarakat tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pencemaran harus segera ditanggulangi dan pelakunya harus dijatuhi sanksi.

Menteri dalam pertemuan itu didampingi tiga stafnya, masing-masing Isa Karmisa Ardiputra yang menjabat Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Daryono dan Darsono.

Penjelasan Daryono, dia membenarkan ada pencemaran di Kepulauan Seribu. Telah lima kali, jelasnya, ditemukan limbah minyak yang

dapat dilihat secara jelas. Yang terbesar pada 20 Desember 2003. Lalu pada April dan Mei 2004 juga terjadi lagi. Kemudian terjadi lagi pada 5 Oktober 2004. "Jadi ada tiga kejadian besar yang melanda Kepulauan Seribu berupa tumpahan minyak berbentuk *tar ball*, yakni minyak mentah yang sudah bercampur pasir dan sebagainya, sehingga menimbulkan gumpalan-gumpalan yang kita sebut sebagai *tar ball*," paparnya.

Sidik Jari Minyak

Pada Desember 2003, lanjutnya, PPNS LH sudah menyidik pencemaran di sana. Petugas mengambil sampel tumpahan minyak untuk disidik. Dan ini bisa dijadikan alat bukti utama di pengadilan, karena sampel itu bisa seperti *finger print* (sidik jari) minyak. Setiap minyak, imbuhnya, mempunyai sidik jari yang berbeda-beda.

Ia mengemukakan, kawasan kepulauan itu memang menjadi lalu lintas laut, termasuk kapal tanker untuk konsumsi Jakarta. Di sana juga ada dua tambang minyak, yaitu BP West Java dan China National Oil of Shore Company (CNOOC) yang kemungkinan menjadi sumber pencemar di sana. Limbah minyak awal kapal itu membersihkan kapal di lepas pantai.

"Dari sampel yang diambil pada Desember 2003 memperlihatkan *finger print*-nya cocok dengan salah satu penambang minyak di sana yakni CNOOC," ungkap Daryono. Pada kasus April-Mei 2004, tuturnya, LH juga melakukan pembersihan bersama-

sama dengan BPLHD Jakarta dan Taman Nasional. Pada kesempatan itu juga diambil sampelnya, dan terakhir pada Oktober 2004, LH bersama BPLHD, Taman Nasional dan instansi terkait termasuk Perhubungan Laut melanjutkan investigasi.

Selain investigasi, jelasnya, juga dibentuk kelompok kerja untuk menangani pencemaran. Kelompok kerja pencegahan di bawah koordinasi pihak ESDM. Ada pokja penanggulangan di bawah koordinasi Ditjen Perhubungan. Ada pokja pemulihan dan evaluasi di bawah koordinasi Bupati, dan juga dilakukan penyelidikan serta penyidikan dan penyelesaian perkara oleh Asdep LH yaitu urusan penegakan hukum LH.

Hasil penyidikan itu, ujarnya, masih menunggu hasil *finger print* yang kini masih di laboratorium Lemigas. Yang sudah diketahui hasilnya adalah kasus pencemaran pada Desember 2003.

Darsono, yang melanjutkan penjelasan Daryono, membenarkan telah didapat status terakhir penyidikan pencemaran minyak di Kepulauan Seribu Desember 2003. Penyidikan dilakukan berdasarkan catatan Kepala TN Sumarto, tanggal 30 Desember, hari itu juga kami mengeluarkan surat perintah penyidikan tanggal 30 Desember.

Menurut dia, penyidikan berlangsung selama tiga bulan. Sampel diambil di 14 bibir sumur dan 23 *tar ball* pun diambil. Sampel, lanjutnya, langsung dimasukkan ke laboratorium, kemudian pihaknya juga meminta keterangan

16 saksi.

"Yang lama meminta keterangan saksi. Hampir tujuh bulan pemeriksaan saksi selesai," paparnya. Hasil laboratorium selesai pada Agustus 2004.

Saksi Ahli

Selain itu, jelasnya, juga meminta keterangan saksi ahli, pada Oktober lalu. Mereka diminta membaca hasil laboratorium. Sebab, lanjutnya, orang laboratorium tidak bisa membaca hasilnya.

Adapun hasilnya bahwa dari pengujian terhadap 23 crude oil CNOOC dan tujuh sampel *tar ball* oleh Lemigas, empat sampel diambil pada kejadian Desember adalah identik. "*Very genetically similar*," ungkapnya. Dari lima sumur di sana, lanjutnya, dilakukan penyidikan dalam tiga tahap pengujian. Semua menyatakan identik

"Pada November lalu, sudah menetapkan tersangkanya yakni CNOOC sebagai penanggung jawab perusahaan. Pada Desember ini sudah memanggil terdakwa, tapi belum mau datang. Bila sudah tiga kali dipanggil tak datang akan dijemput bersama aparat polisi," paparnya.

Dengan demikian, tutur Darsono, sampati saat ini, tidak pernah ada keinginan untuk menerbitkan SP3. Apalagi untuk penyidikan tersebut telah menghabiskan biaya sebesar Rp 125 juta. "Bila semua telah rampung surat perintah dilakukan penyidikan (SPDP) akan segera diberikan ke kejaksaan, dan diharapkan Maret mendatang sudah bisa dilakukan penuntutan," tuturnya. (K-11/W-5)

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																		
1 (2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 22 TAHUN 2004

● Wanda Hamidah Repot karena BBM

RENCANA pemerintah untuk menaikkan bahan bakar minyak (BBM) yang sudah dimulai dengan kenaikan harga Pertamina Plus dan elpiji memancing protes dari banyak kalangan. Salah satu yang ikut meneriakkan protes adalah artis yang juga dikenal sebagai aktivis sosial dan politik, Wanda Hamidah. Menurutnya, kenaikan BBM kali ini sungguh tidak masuk akal. Peralnya, persentase kenaikan mencapai 40 persen.

"Aneh sekali kebijakan seperti ini. Masa di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesukahan, eh pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang tidak populer seperti kenaikan BBM ini," ujar Wanda awal pekan ini, di Jakarta.

Perempuan kelahiran Jakarta, 17 September 1977 ini mengaku menolerir jika yang naik hanya

Pertamax. Ia menganggap, jenis bahan bakar tersebut memang diperuntukkan bagi kalangan tertentu dengan segmentasi menengah atas. Jadi, hanya sedikit orang yang memakainya.

"Nah, meski sekarang saya harus mengeluarkan uang lebih untuk beli Pertamina Plus, saya masih bisa menerima karena toh tak banyak yang menggunakan jenis BBM ini. Tapi, kalau elpiji, saya rasa kurang masuk akal. Elpiji itu kan digunakan oleh banyak orang, termasuk mereka yang berasal dari kalangan menengah bawah. Lah, kok justru dinaikkan juga harganya?" ujar Wanda penuh tanda tanya.

Keheranan Wanda kembali memuncak begitu mengetahui bahwa upah minimum regional (UMR) dan gaji pegawai justru tidak naik

Padahal, harga barang-barang kebutuhan sehari-hari saat ini sudah mulai merambat naik mengikuti kenaikan BBM. Tentunya, fenomena ini meresahkan masyarakat.

Ngomong-ngomong UMR, Wanda hanya bisa tersenyum saat ditanya bagaimana nasib para pegawainya. Baru-baru ini, Wanda merintis bisnis di bidang makanan dengan membuka sebuah restoran Jepang, Aozorasushi Lounge, di Jakarta, bersama sang suami, Cyril Roul Hakim. Menurutnya, bisnisnya berjalan lumayan lancar. Namun, hingga kini, gaji para pegawainya di restoran tersebut belum dinaikkan.

"Yah, mungkin kalau karyawan restoran saya demo untuk minta kenaikan gaji, dengan sanda keributan akan saya naikkan. Kalau mereka tersenyum, (IDN)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16						17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31					

HALAMAN: 16

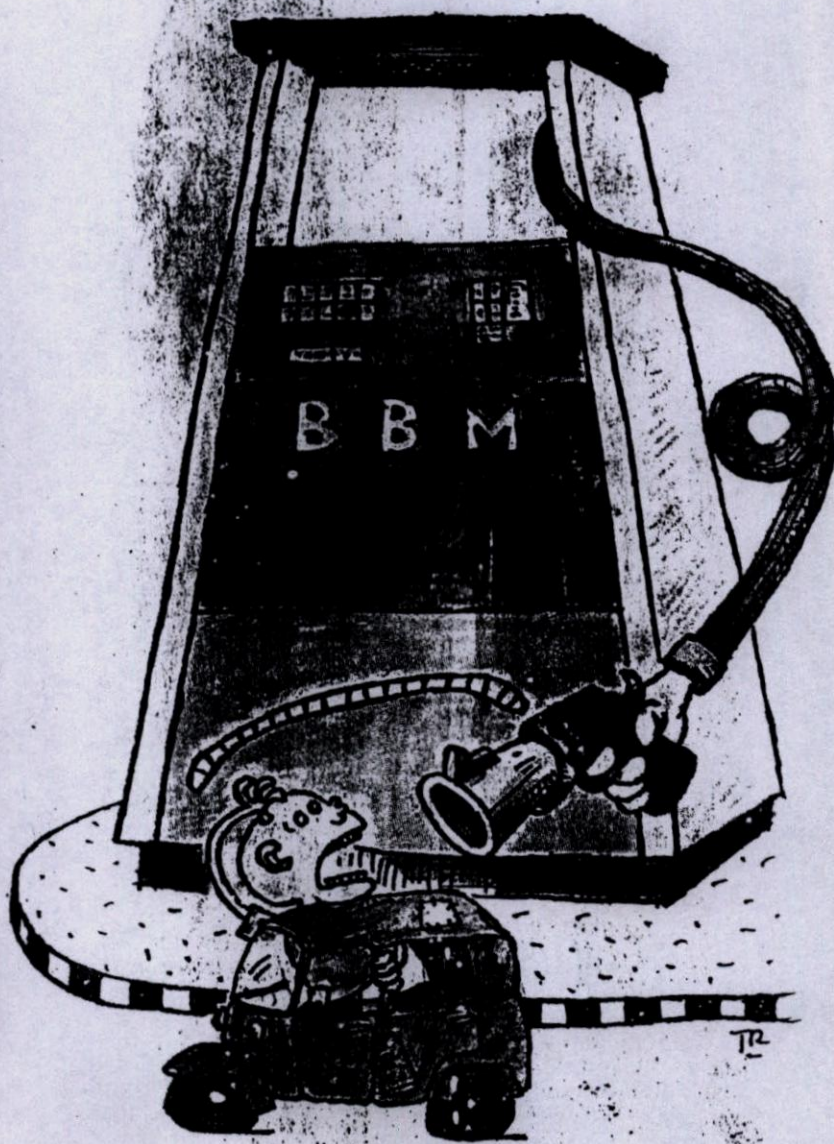
TAHUN 2004

BBM Diskon Angkutan Umum

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM perlu dilakukan dengan kearifan tersendiri. Kenaikan harga BBM di luar minyak tanah memang lebih bijak karena masyarakat golongan menengah ke bawah yang paling banyak mengonsumsinya. Namun, kenaikan pada bensin dan solar tentu akan menyebabkan kenaikan tarif angkutan dan melonjaknya harga barang-barang akibat kenaikan biaya angkut barang. Agar dampak kenaikan harga tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah, alangkah baiknya pemerintah perlu memberikan semacam diskon atau kebijakan harga lama kepada alat angkut transportasi (berpelat kuning) untuk memenuhi kebutuhan BBM. Misalnya, kenaikan harga solar atau bensin 40 persen, maka sopir angkutan yang mobilnya berpelat kuning cukup membayar 10 persen dari kenaikan harga atau cukup membayar dengan harga lama.

Agar data subsidi akurat, pemerintah dapat mengeluarkan *voucher* diskon, dengan satuan liter tertentu pada BBM tertentu juga. Misalnya, pemerintah mengeluarkan *voucher* diskon 30 persen untuk pembelian 2 liter solar. Jika sopir truk hendak mengisi bensin 8 liter, ia harus menyerahkan 4 lembar *voucher* beserta uang senilai harga lama. Namun, *voucher* ini tidak bisa dipakai mobil berbahan bakar bensin, apalagi berpelat selain kuning tetapi dibuat *voucher* khusus yang sama untuk bensin. Pemerintah harus memutar otak layaknya *entrepreneur* untuk mengisi kas negara, tidak hanya dari BBM, tetapi juga dari sumber daya lain yang belum dioptimalkan di negeri yang luas dengan sumber daya yang melimpah.

MUSTAKIM
Kamp Pisang, Jakarta Timur



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 16

TAHUN 2005

Ucapan Menko Perekonomian

Sebagai warga masyarakat pengguna gas elpiji (LPG), saya sangat kecewa dengan penjelasan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakri, mengenai kenaikan harga BBM dan gas. Sebagai bagian dari penanggung jawab kesejahteraan rakyat, tidak selayaknya ia mengucapkan: "Kalau tidak mau, ya tidak usah membeli gas". Ini kalimat seorang pedagang, bukan seorang yang seharusnya memberikan pencerahan kepada rakyat banyak agar memahami alasan penyesuaian harga tersebut. Di samping itu, penjelasan mengenai Pertamina juga kurang mengemukakan masyarakat karena masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah yang berkuasa saat itu, bukan terus lepas tangan untuk diserahkan kepada mekanisme pasar.

Pertamax dan pertamax plus memang dipakai oleh kendaraan-kendaraan baru yang tentunya dapat diasumsikan yang mengonsumsi masyarakat berduit. Namun, gas bukan hanya dipakai oleh golongan menengah ke atas. Di wilayah kami (Perumnas Karawaci Tangerang), pelanggan gas elpiji adalah semua golongan karena lebih irit daripada minyak tanah.

Bagaimana mungkin kita kembali ke minyak tanah, padahal dulu disarankan untuk mengonsumsi gas sebagai pengganti minyak tanah yang pasokannya terbatas. Beralih ke minyak tanah, orang harus mengeluarkan ongkos lagi untuk membeli peralatan masak dari minyak tanah. Ini betul-betul kebijakan yang harus dikoreksi mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih, tetapi harus mengikuti kenaikan gas yang sampai ke tempat konsumen naik lebih dari 50 persen (dari Rp 35.000 menjadi Rp 53.000 per tabung).

ROSYID
Cibodas, Tangerang

42

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16						17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31					

HALAMAN: 16

TAHUN 2005

BBM Naik Kriminal Naik

Keinginan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dengan alasan agar BBM tidak mengalami defisit dan pemilik mobil mewah tidak disubsidi lagi serta mencegah penyelundupan BBM ke luar negeri seharusnya dipertimbangkan secara matang. Sebab, hal ini menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa. Belajarlah dari pengalaman, ketika pemerintahan yang lalu menaikkan BBM dengan solusi subsidi silang kepada masyarakat miskin. Kenyataannya, minyak tanah yang murah berkat subsidi silang hilang di pasaran karena diborong para spekulan untuk dijual ke luar negeri dan kepada pengusaha kapal ikan yang telah memodifikasi mesin kapalnya untuk disesuaikan dengan BBM minyak tanah. Bentuk subsidi silang lainnya, yaitu pengobatan gratis, pendidikan murah, serta pendistribusian raskin kepada masyarakat miskin, justru berbuah korupsi

yang hebat oleh pihak pelaksananya. Sebelum BBM naik seperti sekarang ini, uang Rp 20.000 masih dapat dipergunakan oleh ibu rumah tangga untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kini, dengan uang sebanyak Rp 50.000 sudah sulit untuk dibagi-bagi membeli kebutuhan pangan sekalipun dengan gizi sederhana. Kenaikan harga BBM telah memicu harga kebutuhan sehari-hari ikut melambung tinggi tanpa dapat dikontrol oleh pemerintah. Warga pengguna kendaraan umum menanggung kenaikan ongkos karena para pengusaha akan selalu mengalihkan resiko kenaikan harga BBM kepada konsumen.

Perlu diingat, masih banyak warga yang berpenghasilan di bawah Rp 500.000 per bulan. Tak dapat dibayangkan bagaimana mereka dapat mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika pemerintah tetap ngotot menaikkan harga BBM, dikhawatirkan memicu maraknya kriminalitas dan masyarakat akan semakin resah. Sebab, warga yang tidak mampu mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari akan melakukan tindakan apa saja asalkan dapat bertahan hidup. Demikian halnya dengan golongan yang kuat semakin mengeksploitasi yang lemah agar kekayaannya tidak terusik karena kenaikan harga BBM.

MANGAPUL MANALU
Jalan Bona Bona No 5,
Pematang Siantar

43

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA
 SUARA PEMBARUAN

INVESTOR DAILY
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 55 - 61

TAHUN 20

Aceh tanpa Gelombang Gas

NANGGROE Aceh Darussalam binasa dalam sekejap setelah gempa bumi dan gelombang tsunami menggilasnya pada pekan lalu. Ribuan nyawa melayang, kehidupan melorot ke titik nadir. Padahal, selama tiga dasawarsa provinsi ini pernah berjaya berkat kemakmuran yang dialirkan oleh gas alam Aceh yang masyhur. Sekitar 17,1 triliun kaki kubik gas alam yang dulu tersimpan di perut bumi Aceh telah menegakkan berbagai industri di wilayah tersebut. Tanah Aceh bagai besi berani bagi ribuan pencari kerja. Namun, cadangan gas alam itu kian pupus, membuat napas pabrik-pabrik tersendat. Kota-kota gas yang pernah riuh dan bercahaya kini redup, mati, dan miskin. Selama dua pekan, wartawan *Tempo* Ali Anwar merekam kehidupan di pesisir utara Aceh yang tak lagi bergelombang gas—dan kini tengah diterpa kehancuran. Berikut ini laporannya:

SENJA sudah turun di Kreung Geukeuh. Hawa malam lekas saja membungkus kota kecil di pesisir utara Aceh dengan kegelapan. Sebagian rumah cuma diterangi sinar redup. Di satu dapur yang modern, sumber penerangannya... astagfirullah! cuma lampu teplok. Padahal, dapur milik Nilawati, 34 tahun, itu terletak di kompleks perumahan PT Asean Aceh Fertilizer (AAF). Selama 20

tahun perusahaan yang tegak di Kreung Geukeuh, Kabupaten Aceh Utara, ini memproduksi pupuk berbahan gas alam. Selama itu pula, rumah-rumah di kompleks tersebut tak pernah kekurangan listrik, entah untuk lampu ataupun alat-alat rumah tangga.

Maka, bersungut-sungutlah Nilawati yang hari itu terpaksa memasak mi goreng dengan kompor minyak tanah. Katanya: "Era lampu teplok hadir lagi. Dunia serasa berbalik seperti era 1970-an." Gelap memang hal biasa bagi warga Aceh yang berdiam di luar kompleks AAF. Tapi bagi keluarga pekerja pabrik pupuk milik negara-negara Asia Tenggara itu, gelap adalah soal luar biasa. Pasalnya, sejak AAF dibangun dua dekade silam, tak ada istilah gelap.

Bersumber generator, semua penerangan dipasang nyaris tanpa batas. "Dulu, terang-benderang siang maupun malam," kata Edwar Salim, Ketua Media dan Opini Publics Task Force PT Asean Aceh Fertilizer. Semua fasilitas rumah tangga menggunakan listrik. Penyejuk udara, setrika, mesin cuci. Kompor? Tentu saja pakai gas alias tinggal klik!

Tapi cobalah datang ke Kreung Geukeuh pada hari-hari ini. Semua kemudahan di atas bagaikan "kilas balik" saja. Setiap rumah di kompleks AAF hanya diberi aliran listrik berkapasitas 900 watt. Daya listrik sekecil itu, tentu saja, berdampak pada pengurangan sejumlah komponen. Bohlam yang biasanya menyala di setiap kamar dan sudut-sudut rumah, sekarang dinyalakan harus bergantian. "Kalau nyala di ruang tidur, lampu ruang tamu harus dimatikan," kata Edwar.

Singkat cerita, Kota Lhok Seumawe dan kawasan Aceh Utara, yang selama tiga dasawarsa selalu riuh dan bercahaya oleh industri gas—serta industri-industri lain yang bersandar pada gas alam seperti kertas dan pupuk—perlahan-lahan sepi dan gelap. Nasib wilayah di pesisir utara Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tampaknya bakal sama dengan kota-kota pascaminyak dan gas di sepanjang pesisir Sumatera: Kutabinjau, Langsa, dan Pangkalan Brandan. "Inikah tanda-tanda kematian kota pascagas?" kata Said Abdul Kadir, rekan Edwar Salim, mengomentari situasi di kediaman mereka, kompleks perumahan AAF.

Komentar Said bukan tanpa alasan. Aceh Utara dan Lhok Seumawe perlahan-lahan memasuki era kematian industri. Jejak-jejaknya sudah terlihat. Lihatlah suasana di kompleks perumahan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Kreung Geukeuh. Rumput ilalang yang lima tahun lalu "dilarang" tumbuh, kini menjalar dengan merdeka. Hotel Cut Meutia yang terbakar pada 1999, tak dibangun kembali. Puing-puingnya tertutup semak belukar. "Tak ada dana untuk membangun lagi," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat PT Pupuk Iskandar Muda, Teuku Fachrulsyah.

Mari kita lihat mesin-mesin pabrik PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang juga berlokasi kawasan Aceh Utara.

Berlapis karat, mesin-mesin itu telah menjadi benda mubazir karena sejak 2003 tak lagi memproduksi. "Padahal, barang itu adalah amanah yang dibeli dengan uang rakyat," ujar Ketua Tim Task Force PT KKA, Muhammad Thaif.

Kondisi memprihatinkan juga terlihat di perusahaan gas alam cair terbesar di dunia, PT Arun NGL Co., Kota Lhok Seumawe. Pioneer Camp, bekas permukiman para tenaga ahli asal mancanegara, kini hancur

lebur tak menyisakan jejak kegemilangan gas alam Aceh yang masyhur itu. Ketika *Tempo* menyambangi kompleks perumahan yang menghadap ke Selat Malaka itu, puluhan rumah yang berbentuk kotak-kotak api tampak sudah tercabik-cabik oleh alam dan menjadi sarang binatang melata, biawak.

Sebagian lagi sudah diratakan oleh bulldoser. Gedung serbaguna untuk perpustakaan dan video, sarana olahraga, masih berdiri, namun plafonnya jebol, isinya lenyap entah ke mana. Kolam renang yang dulu asri tempat tuan-tuan asing berenang, meregangkan tubuh di bawah langit Aceh yang jernih, kini kusam tak terawat. Dari sela-sela lantainya menyembul rumput liar. Lalu ke mana restoran-restoran dan kafe tempat para ekspatriat mencairkan kelelahan? Sudah ambruk!

Minimarket yang di dalamnya pernah menjual berbagai kebutuhan hidup komunitas—termasuk minuman keras khusus untuk orang asing dengan berbagai merek dan jenis—kini kosong melompong. Pantai Arun yang sebelumnya ditata baik, indah dan menjadi tempat rekreasi warga Lhokseumawe, telah tertutup untuk umum. Area Pioneer Camp seluas lima hektare yang mirip rumah-rumah hantu itu kini digembok dan ditinggalkan sepasukan tentara penjaga obyek vital.

Perumahan Rancong, tempat kediaman para pegawai PT Arun, kini rata dengan tanah, ditumbuhi rumput, pohon-pohon peneduh dan kelapa sawit. Penghuni kompleks itu bukan lagi manusia, melainkan lembu, kerbau, dan bangau (lihat *Mereka Kembali ke Habitatnya*). Lima kilometer dari Pioneer Camp, dalam kompleks perumahan Arun, keterpurukan serupa bisa dilihat dengan mata telanjang. Fasilitas pendidikan seperti gedung Taman Kanak-kanak, SD, dan SMP dibiarkan kosong tak terawat. "Anak sekolah yang tinggal di luar kompleks sudah tak lagi dijemput bus sekolah," kata Amin Ibrahim, seorang warga Arun.

Arun juga memiliki Executive Club yang dulu biasa digunakan untuk tempat menginap tamu-tamu khusus: kini kosong-melompong. "Bahkan, awal 2005, kami akan merobohkan sekitar 200 rumah di Jalan Cilacap," kata pejabat sementara Presiden Direktur PT Arun, Akmasio Sabri. Alasannya, pada Desember 2004, sebanyak 262 karyawan sudah tidak menghuni kompleks perumahan karena pemecatan. "Biaya perawatanannya besar sehingga harus dibongkar," kata Akmasio.

Terpuruknya industri gas alam, kertas, dan pupuk terpancar dalam kehidupan komunitas mereka masing-masing. Luruhnya kejayaan industri-industri ini merupakan akumulasi berbagai faktor sejak tahun 2000. Ketika kota-kota lain menyongsong abad ke-21 sebagai era gas, justru daerah penghasil gas Indonesia di pesisir utara Aceh mulai sekarat. Cadangan gas di perut Bumi Serambi Mekah itu sudah menerjang titik nadir.

Ketika pertama kali ditemukan pada 1971, cadangan gas Aceh di Arun diperkirakan mencapai 17,1 triliun kaki kubik (*triliun cubic feet/TCF*). "Ladang gas di Arun adalah sebuah anugerah," kata *Public Affairs Manager* PT Exxon Mobil Aceh, Deddy Afidick. Pada tahun 2000, total produksi gas yang sudah dipalkan adalah 3.516 kargo gas alam cair. Jumlah ini setara dengan perkiraan awal: 17,1 triliun kaki kubik. Pada 2003, ketika pengapalan mencapai 3.795 kargo (setara dengan 18,975 triliun kaki kubik) terlihat bahwa kandungan gas Aceh sudah melampaui angka perkiraan awal.

Dengan lain kata, cadangan gas Arun sudah tinggal kerak. Menurut Deddy, berdasarkan statistik sudah sulit menemukan ladang gas sekaliber Arun. Memang, sudah ditemukan ladang gas di Lhoksukon, Pasai, dan NSO (North Sumatera Offshore) yang terletak di Selat Malaka. "Tapi sama sekali tak setara Arun," ujar Deddy.

Mengingat cadangan gas kian menipis, pemerintah memutuskan gas untuk pabrik Pupuk Iskandar Muda,

Asean Aceh Fertilizer, dan Kertas Kraft Aceh yang sebelumnya dipasok ExxonMobil dari lapangan Arun, dialihkan melalui lapangan Blok A di Asamerah. Pada saat yang sama, 28 Agustus 2000, Pertamina dan Jepang meneken perjanjian jual-beli Arun II Extension selama lima tahun (2000-2005) dengan nilai total US\$ 1 miliar atau sekitar Rp 9 triliun.

Konflik bersenjata di Aceh membuat realisasi pasokan gas dari Blok A ke pabrik pupuk dan kertas tak terwujud. Pabrik pupuk dan kertas menjerit. Pemerintah turun tangan agar ExxonMobil memasok gas kepada Pupuk Iskandar Muda, Asean Aceh Fertilizer, dan Kertas Kraft Aceh. Sayang, produksi kilang gas ExxonMobil terhenti pada 9 maret 2001, dengan alasan gangguan keamanan. Akibatnya, PIM dan AAF mengalami *opportunity losses* (kehilangan kesempatan penerimaan) sebesar US\$ 75 juta.

Pada 2001, pemerintah kembali mengalirkan gas sebesar 75 juta kaki kubik. Tapi bersamaan dengan berakhirnya masa kontraknya pada Agustus 2003, ExxonMobil menghentikan pasokannya. Alasan Exxon, pemerintah Indonesia tak kunjung meneken *value retention* (persamaan pendapatan). ExxonMobil ingin menjual gas seharga US\$ 1,85 per *million metric british thermal unit* (MMBTU), sedangkan AAF sebagai salah satu pembeli bertahan dengan harga US\$ 1 per MMBTU.

Menurut Ketua Serikat Pekerja PT AAF, Marwan Yahya, pada 2003 AAF menyetujui harga yang ditawarkan ExxonMobil. Namun, sewaktu paraf persetujuan hendak diteken, Exxon beralasan stok gas tidak mencukupi. "Jadi, terkesan kuat ada upaya terselubung dari pihak tertentu untuk menghancurkan AAF," ujar Marwan.

Sementara itu, upaya pengalihan (*swap*) kontrak ekspor LNG Arun ke lapangan gas Bontang, Kalimantan Timur, yang rencananya dimulai 1 Januari 2004, tak kunjung berjalan karena lapangan Bontang mengalami gangguan. Akibatnya, PT PIM kembali menderita kerugian Rp 16 miliar dan PT AAF Rp 26 miliar. Akibatnya, sejak Agustus 2004, produksi pabrik AAF terhenti. Karyawan yang berjumlah 1.500 orang diminta bekerja selama tiga hari dalam sepekan dengan konsekuensi pemotongan gaji. Pada 1998, produksi KKA mencapai 36.591 ton turun drastis menjadi 11.368 ton. "Pangsa pasar kami hilang," ujar Thaif.

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja mengelayuti karyawan AAF begitu genderang kematian ditabuh pemerintahan Megawati Soekarnoputri pada 4 Oktober 2004. Pemerintah memutuskan akan segera menutup pabrik AAF. Sebagai gantinya, pemerintah bakal mempertahankan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) I dan II.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ketika itu, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, menyatakan, keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan kondisi pasokan gas nasional dalam jangka menengah. Selama ini, kebutuhan gas untuk tiga pabrik itu dan KKA dipasok dari lapangan gas Arun oleh ExxonMobil. Belakangan, cadangan gas di lapangan itu menipis.

Karena itu, pemerintah menilai perlu mengembangkan lapangan gas Blok A, yang memiliki cadangan sekitar 560 kaki kubik. Tapi setelah dihitung, kata Dorodjatun, cadangan di Blok A itu pun tidak akan mampu memasok gas ketiga pabrik pupuk itu. "Sehingga pemerintah memilih untuk menutup pabrik AAF yang telah berusia lanjut," kata Dorodjatun.

"Ini pukulan yang amat menyedihkan," kata Marwan kepada *Tempo*. Sikap itu, kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada industri pupuk. Rencana penutupan kontan saja membikin tersengal karyawan pabrik (lihat *Ke Atas Tampak Lutut, ke Bawah Tampak Pusing*) jantung daerah binaan mereka—antara lain, pasokan listrik dari pabrik untuk sekitar 20 desa terhambat. Pembinaan usaha kecil dan menengah terhenti. Dari catatan pemerintah, binaan PIM dan AAF mencapai 7.594 usaha kecil dan 334 koperasi dengan jumlah dana tersalur Rp 48,7 miliar.

Kondisi ini otomatis menimbulkan efek ganda pada perekonomian warga di Aceh Utara dan Lhok Seumawe. Bandar udara Lhoksukon dan Malikussaleh sudah tak seramai dulu. Beberapa pusat pertokoan seperti Cunda Plaza tutup. Kedai kelontong, warung kopi, dan gerobak, yang berdekatan dengan pabrik juga menggembok warung mereka. "Tak ada pembelinya," kata Ti Mariah, 45 tahun, pedagang nasi di depan gerbang AAF, kepada koresponden *Tempo* di Aceh, Imran M.A.

Niat pemerintah menutup pabrik AAF yang dinilai banyak kalangan tidak populis itu mendapat berbagai kecaman. Ketua sementara DPRD Nanggroe Aceh Darussalam, Jauharuddin Harmay, menilai kebijakan itu amat menyakitkan. "Jika ini terjadi, kami khawatir akan memunculkan potensi konflik baru," kata Jauhari kepada pers saat itu.

Aceh yang terasa panas mulai terasa sejuk begitu Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden. Manajemen AAF bersama tokoh masyarakat dan ulama bertemu dengan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla di Jakarta. Desakan juga disampaikan tokoh masyarakat Aceh, Teuku M. Nur Hasballah, dalam kesempatan dialog telekonferensi dengan Yudhoyono pada 19 Oktober. "Mohon Bapak membuka lapangan pekerjaan dan kembali menghidupkan AAF dan KKA guna menanggulangi," kata Nur Hasballah.

Yudhoyono tak memberi tanggapan langsung atas sejumlah permintaan itu. Ia hanya mengatakan akan mempelajari berbagai masukan yang disampaikan dalam telekonferensi itu. Tapi 10 hari kemudian, pemerintahan Yudhoyono memberi angin segar. Menteri Perindustrian Andung A. Nitimihardja menyatakan tetap berupaya mempertahankan keberadaan AAF. Alasannya, AAF telah memberi banyak masukan bagi keuangan negara. Selain itu, AAF dinilai sarat dengan nuansa kerja sama internasional sesama negara ASEAN. "Kita menunggu audit teknologi yang sedang dijalankan," ujar Andung.

Andung menawarkan dua opsi untuk menyelamatkan AAF. Opsi pertama menjadwalkan kembali ekspor gas alam cair dari lapangan gas Arun dan Bontang. "Itu kita lakukan sambil menunggu gas baru yang ada." Opsi kedua melakukan pertukaran (*swap*) antara pasokan gas untuk PT Pupuk Kaltim dan AAF. Dengan opsi ini, pasokan untuk Pupuk Kaltim akan dikurangi. Dampaknya salah satu dari lima pabrik Pupuk Kaltim harus ditutup.

Pihak AAF ternyata menolak rencana audit teknologi. Alasannya, persoalan yang dihadapi AAF bukan teknologi, melainkan ketersediaan gas. Mereka juga tak melihat langkah konkret dari pemerintahan Yudhoyono. "Selama gas belum masuk ke AAF, kami belum percaya pada janji-janji," ujar Marwan.

Ulama kharismatis Aceh, Abu Panton, berharap pemerintah dan ExxonMobil yang memiliki teknologi tinggi tetap memberi pasokan kepada pabrik pupuk di Aceh. Dengan cara itu, lapangan kerja tetap hidup di Aceh. "Supaya semua proyek di Aceh tidak disebut-sebut sebagai pascagas," kata Abu Panton dalam acara silaturahmi di PT Arun pada 22 November.

Untuk lebih meyakinkan pemerintah, sekitar 300 orang karyawan AAF terbang ke Jakarta dan unjuk

rasa di Istana Negara pada 3 Desember. Menurut Ketua Tim Media Opini Publik dari Task Force PT AAF, Edwar Salim, gas yang dibutuhkan PT AAF hanya enam kapal per tahun. "Itu hanya lima persen dari produksi ExxonMobil saat ini," ujarnya.

Menurut Edwar, alasan pemerintah tidak memasok gas dari Exxon adalah karena pasokan menipis. "Tapi setiap hari kami melihat gas berlalu di depan kami, kami hanya bisa gigit jari," ujarnya. Menurut dia, pihaknya tidak meminta, tetapi membeli gas tersebut untuk kehidupan Aceh.

Setelah didesak, pemerintah memastikan akan melakukan penjadwalan ulang pasokan gas ke Korea Selatan dan Jepang. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto mengatakan, langkah ini ditempuh sebagai upaya memenuhi kebutuhan gas untuk industri pupuk dalam negeri.

"Sehingga pabrik pupuk itu (AAF) dapat beroperasi kembali hingga ada jaminan tersedianya gas yang baru," ujar Sugiharto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Perindustrian DPR di Jakarta pekan lalu. "Paling lambat akhir bulan ini."

Upaya karyawan AAF semakin mulus begitu bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. "Pak Purnomo menjanjikan gas sudah dikirim ke AAF paling lambat Januari 2005," kata Marwan. Bila tidak terpenuhi, maka pada Februari AAF akan jatuh pailit.

Itu sebabnya, anak-anak Aceh ini terus menggiring kebijakan pemerintah untuk menghidupkan kembali pabrik-pabrik yang terancam tutup. Agar gas benar-benar mengalir pada awal 2005, agar mesin-mesin kembali berderak, cerobong pabrik mengepul, pasokan listrik kembali normal. Dan lampu teplok bisa dilontarkan kembali ke masa silam.



MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA
 SUARA PEMBARUAN

INVESTOR DAILY
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2004

Kenaikan Harga BBM

ADA yang menarik dari pendapat Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil saat diwawancarai oleh sebuah radio pada 24 Desember lalu. Ia mengungkapkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dilakukan karena kewajiban moral pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan. Subsidi bagi masyarakat menengah, menengah atas, dan orang kaya dikurangi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Menurut Sofyan Djalil, isu pokoknya sebenarnya bukan pada kenaikan harga BBM, melainkan pengurangan subsidi BBM yang selama ini tidak mencapai target. Subsidi diberikan dengan tidak membedakan kelompok penghasilan masyarakat. Karena yang disubsidi adalah komoditas bahan bakar, siapa yang paling banyak mengkonsumsi bahan bakar akan mendapat subsidi paling besar.

Dengan demikian, pemerintah berpikir demi keadilan maka sebagian subsidi yang jatuh kepada orang kaya dikurangi untuk diberikan kepada orang yang miskin. Seandainya bisa dikurangi separuhnya saja dana subsidi dari jumlahnya yang Rp 73 triliun,

pemerintah mempunyai dana sekitar Rp 35 triliun yang bisa digunakan untuk mengangkat bidan, memperbaiki puskesmas, membangun atau memperbaiki sekolah, dan memberikan beasiswa anak-anak miskin.

Sofyan juga menjelaskan, sebenarnya pemerintah tidak menghapus semua subsidi. Minyak tanah tetap akan disubsidi, solar untuk angkutan tetap disubsidi, bahkan premium pun akan tetap disubsidi, hanya saja jumlah subsidinya dikurangi. Pada dasarnya keinginan pemerintah adalah untuk menciptakan kondisi agar masyarakat yang mampu dikurangi subsidinya untuk kepentingan masyarakat lebih luas.

Pemerintah memprogramkan sebagian dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan dana kesehatan. Seperti kita ketahui, dana sektor kesehatan hanya sekitar Rp 7,2 triliun untuk merawat 220 juta rakyat Indonesia. Sedangkan subsidi bahan bakar sebesar Rp 7,3 triliun yang 85 persen diterima oleh kelas menengah, menengah atas, dan orang kaya.

Penjelasan pemerintah itu cukup beralasan, hanya kurang sosialisasi sehingga mendapat sambutan negatif sebagian masyarakat. Pemerintah sebaiknya terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum memberlakukan suatu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik.

SURAT

ALAMSYAH
 Jagakarsa, Jakarta Selatan
 alamssyah@yahoo.com

45